



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN PANAI HILIR
KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA**

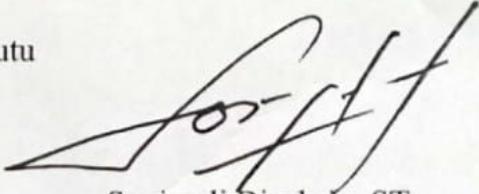
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU
TA. 2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR KAJIAN STRATEGIS**

Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir
Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu
Tim Pelaksana :
a. Penanggung Jawab : Ervi Sukaesih Harahap, SE
b. Ketua Tim : Parsaoran Gultom, SP
c. Anggota : 1. Asnita Rehulina Nasution, S.Pd
2. Elyabjaz, SE
3. Rusdi Michael P, SP
4. Bethesda Sitanggang, S.Sos, M.Si
5. Darnita M. Sinaga, SE, MM
6. Eryanti Manurung, SE
7. Marlina Zetri, SE
8. Adil Johanes Turnip, ST
Tenaga Ahli Peneliti : Hazmi Arief, S.Pi, M.Si.
Tanggal Seminar : 12 Desember 2018

Disetujui Oleh :
Tim Pengendali Mutu


Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos, MM
Ketua


Soniyudi Bizahrin, ST
Sekretaris

Agustina Maya Rambe, SE,MM
Anggota

Diketahui Oleh :
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Labuhanbatu

HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.SOS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19641121 198602 1 001

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat berkat dan anugerahNya yang masih memberikan kita kesehatan sehingga diberikan kesempatan menyelesaikan penyusunan kegiatan kajian penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu”.

Komunitas nelayan adalah kelompok yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pesisir pantai. Tingkat pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapannya atau produksi hasil tangkapan. Banyaknya tangkapan akan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan sehingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bersama pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Kami menyadari bahwa kajian penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu akan terus membenahi diri, termasuk di dalam melakukan kajian penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan sebagai bahan evaluasi kami kedepannya. Semoga kajian penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Rantau Prapat, Desember 2018

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU**
Kepala,

HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641121 198604 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat berkat dan anugerahNya yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kegiatan Pengkajian/ Penelitian Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Penyusunan kajian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memepengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bersama pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan usahanya perikanan tangkap di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

Metode pengambilan contoh yang digunakan dalam mengumpulkan data pada kajian ini adalah *purposive sampling*. Pada kajian ini yang menjadi responden adalah pakar dan key informan. Responden diberikan informasi yang rinci oleh peneliti dalam tahap pengumpulan data. Responden adalah orang yang memiliki kapasitas berdasarkan kepakaran terkait pengembangan potensi unggulan investasi. Metode *purposive sampling* ini menentukan para pakar yang dijadikan responden dalam menentukan bobot nilai dari kriteria kebijakan. Pada penelitian ini responden pakar terdiri dari kalangan akademisi, peneliti, birokrat pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kritik dan saran yang membangun amat kami nantikan dari kalangan pembaca sebagai bahan evaluasi kami kedepannya.

Rantau Prapat, Desember 2018

Tim Penulis

RINGKASAN

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara intensif dilanda kemiskinan. Kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan biasanya dilatar belakangi oleh kurangnya modal dan teknologi yang dimiliki para nelayan, rendahnya akses pasar dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam. Mengingat Negara Indonesia merupakan negara dengan luas laut terbesar, kita memiliki potensi untuk memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan khususnya masyarakat nelayan. Namun, realitanya masyarakat belum mampu meningkatkan hasil produksi mereka, bahkan profesi sebagai nelayan cenderung identik dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima hingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Di dalam penelitian ini variabel dependen adalah pendapatan nelayan dan variabel independen adalah modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja dan teknologi. Banyaknya sampel adalah 51 orang dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara serta pengisian kuesioner oleh responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing- masing indepen variabel yaitu: modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja, dan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nelayan. Sementara itu indepen variabel berpengaruh secara simultan terhadap dependen variabel.

SUMMARY

Results of some studies showed that the fishing community is one group of people who intensively plagued by poverty. Poverty experienced by fishermen community are usually motivated by a lack of capital and technology owned by the fishermen, poor market access and low community participation in processing the natural resource. Recognizing that Indonesia is a country with the largest sea area, we have potential to utilize this situation for increasing our welfare, especially the fishing community. However, the society has not been able to increase their production, and furthermore the fishermen profession tend to be synonymous with poverty. The rate of fishermen's welfare is largely determined by the catch. The amount of the catch also directly affect the amount of income received by the fishermen were able to meet the basic needs for life

This research was conducted in order to determine factors that affect income of fishermen in Panai Hilir District of Labuhanbatu. In this research dependent variabel is income of fishermen and independent variable such as working capital, labor, fishing experience, and technology. The number of samples is 51 fishermen with purposive sampling methode. Data collection techniques were carried out through direct observation to the field and conducting interviews and filling out questionnaires by respondents. The data analysis method used is the OLS (Ordinary Least Square) method.

The results of the study indicate that each independent variable, namely: working capital, labor, work experience, and technology significantly influences the income of fishermen. While the independent variables have simultaneous effect on dependent variable.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Sambutan	ii
Ringkasan	iii
Summary	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Kegiatan	3
1.3. Tujuan Kegiatan	3
1.4. Sasaran	4
1.5. Manfaat	4
1.6. Ruang Lingkup	5
II. TINJAUAN TEORITIS.....	6
2.1. Tinjauan Teoritis	6
2.1.1. Nelayan	6
2.1.2. Teori Pendapatan	7
2.1.3. Teori Produksi	9
2.1.4. Fungsi Produksi	9
2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	11
2.2.1. Modal dan Biaya Produksi	13
2.2.2. Faktor Tenaga Kerja	15
2.2.3. Faktor Pengalaman	16
2.2.3.1. Pengukuran Pengalaman Kerja	16
2.2.4. Faktor Teknologi	18
2.3. Faktor Pemberdayaan	18
2.4. Program Bantuan Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Nelayan	19
2.4.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	19
2.4.2. Pemberdayaan Usaha Mina perdesaan Perikanan Tangkap (PUMP)	19
2.4.3. Pemberdayaan Usaha Mina perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap (PUMP)	21
2.4.4. Peningkatan Kehidupan Nelayan	21
III. METODOLOGI.....	23
3.1. Waktu dan Lokasi Kajian	23
3.2. Desain Kajian	23

3.3. Metode Pengambilan Contoh	24
3.4. Kerangka Pemikiran	24
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Teknik Analisis Data	27
3.7. Pengujian Hipotesis	28
3.7.1. Uji Statistik	28
1. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	28
2. Pengujian Signifikan Simultan (Uji f-test statistik)	28
3. Pengujian Signifansi Parameter Individual (Uji t-test Statistik)	29
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	30
1. Uji Multikolinearitas	30
2. Uji Autokorelasi	30
3. Uji Heteroskedasitas	30
4. Uji Normalitas	30
3.8. Analisis SWOT	31
3.9. Analisis Kelembagaan	31
IV. POTENSI DAERAH DAN KONDISI EKSISTING NELAYAN	35
4.1. Kondisi Umum Daerah	35
4.1.1 Letak Geografis	37
4.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi	37
4.1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Panai Hilir	40
4.2. Kondisi Eksisting Masyarakat Nelayan	42
4.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi	42
4.2.2 Klasifikasi dan Keadaan Usaha Nelayan	42
4.2.2.1. Nelayan Buruh	42
4.2.2.2. Nelayan Motor Tempel	43
4.2.2.2.1. Nelayan dengan kapal motor lebih kecil dari 5 GT	43
4.2.2.2.2. Nelayan dengan kapal motor lebih dari 5 GT	44
V. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN	46
5.1. Hubungan Antar Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat	46
5.1.1. Modal Kerja Terhadap Pendapatan	46
5.1.2. Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan	47
5.1.3. Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan	47
5.1.4. Teknologi Terhadap Pendapatan	48
5.2. Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis	49
5.2.1. Hasil Penelitian	49
5.2.2. Uji Statistik	50
5.2.2.1. Koefisien Determinasi (R^2)	50
5.2.2.2. Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f)	51
5.2.2.3. Pengujian Signifikan parsial (Uji-t)	52
5.3. Uji Asumsi Klasik	52
5.3.1. Uji Multikolinearitas	52

5.3.2. Uji Autokorelasi.....	53
5.3.3. Uji Heteroskedasitas	54
5.4. Pembahasan Hasil Regresi	55
5.4.1. Konstanta atau Intersep.....	55
5.4.2. Modal Kerja (X1)	55
5.4.3. Tenaga Kerja (X2).....	56
5.4.4. Pengalaman Kerja (X3)	57
5.4.5. Teknologi (X4)	57
VI. ARAHAN KEBIJAKAN	59
6.1. Konsep Pemberdayaan	59
6.1.1. Pemberdayaan Ekonomi.....	61
6.1.2. Model Pemberdayaan Masyarakat nelayan.....	61
6.1.3. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan	62
6.1.3.1. Pengembangan Akses Permodalan.....	62
6.1.3.2. Pengembangan Akses Pemasaran.....	62
6.1.3.3. Pengembangan Akses Teknologi.....	62
6.1.3.4. Peningkatan Peran Kelembagaan lokal	63
6.1.3.5. Pendampingan secara Kontinyu Oleh Pemerintah	63
6.1.3.6. Pengembangan Ekonomi Basis Lokal Atau Ekonomi Setempat	64
6.1.3.7. Pembangunan Prasarana Penunjang Usaha Perikanan	64
6.1.3.8. Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga (<i>Momprenneur</i>).....	65
6.2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi	65
6.3. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir dan Hubungannya Terhadap Sistem Toke Pada Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu	67
6.4. Analisis Kelembagaan.....	70
6.4.1. Kelembagaan Usaha Perikanan.....	70
6.4.2. Analisis <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Perikanan.....	73
VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	77
7.1. Kesimpulan	77
7.2. Rekomendasi.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Pengumpulan Data.....	27
Tabel. 2	Matrik Analisis Swot	32
Tabel. 3	Luas dan Jumlah Penduduk Menurut Desa	36
Tabel. 4	Jumlah Penduduk Pada Setiap Desa Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel. 5	Modal Kerja Terhadap Pendapatan	41
Tabel. 6	Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan	46
Tabel. 7	Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan	47
Tabel. 8	Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan	48
Tabel. 9	Teknologi Terhadap Pendapatan	49
Tabel. 10	Hasil Estimasi Metode OLS	50
Tabel. 11	Corelation Matrix	52
Tabel. 12	Hasil Estimasi Metode OLS	53
Tabel. 13	Heteros Kedastility Test	54
Tabel. 14	Matriks Swot Strategi Pemberdayaan Ekonomi.....	66
Tabel. 15	Analisis Stakeholder Pengembangan Sumber Daya Perikanan.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar. 2 Hasil Uji Normalitas	55
Gambar. 4 Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Dalam Pengembangan Perikanan Yang Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu	74



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan luas laut yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat nelayan. Realita masih menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu meningkatkan hasil produksi mereka, bahkan profesi sebagai nelayan cenderung identik dengan kemiskinan.

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud dengan Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya nelayan terdiri dari 4 jenis:

1. Nelayan Kecil. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
2. Nelayan Tradisional. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
3. Nelayan Buruh. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
4. Nelayan Pemilik. Nelayan pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

Tingkat pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapannya atau produksi hasil tangkapan. Banyaknya tangkapan akan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan sehingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan menurut Sujarno (2008) menyatakan bahwa faktor sosial dan ekonomi terdiri dari besarnya biaya, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh, dan pengalaman. Sedangkan faktor pendidikan bagi nelayan tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka beranggapan sebagai seorang nelayan tradisional sedikit banyak merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman. Namun persoalan yang akan muncul dari rendahnya tingkat pendidikan yang mereka peroleh ialah ketika nelayan tradisional ingin mendapatkan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan tingkat pendidikan rendah yang mereka miliki atau bahkan tidak lulus SMP, maka kondisi tersebut akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain menjadi nelayan.

Kabupaten Labuhanbatu dengan Ibukotanya Rantauprapat memiliki luas wilayah 922.318 ha (9.223,18 km²) atau setara dengan 12,87 % luas Propinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu merupakan jalur lintas timur Pulau Sumatera dengan jarak 285 km dari Medan, Ibukota Propinsi Sumatera Utara, 329 km dari Propinsi Riau dan 760 km dari Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 1° 41' – 2° 44' Lintang Utara dan 99° 33' – 100° 22' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur dengan Propinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Propinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.



Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan yaitu Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan, Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hilir, Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Rantau Utara. Namun, dalam penelitian ini daerah yang lebih difokuskan adalah Kecamatan Panai Hilir.

Kecamatan Panai Hilir menempati area seluas 342,03 Km² yang terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Panai Hilir adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan selat Malaka, sehingga kaya akan hasil lautnya. Menurut Badan Pusat Statistik pada Tahun 2016, jumlah nelayan di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 6.133 orang, dimana sebanyak 4.366 orang diantaranya terdapat di Kecamatan Panai Hilir. Jumlah armada tangkap ikan (kapal dan boat) mencapai 2.472 unit dan hasil tangkapan laut mencapai 7.789,9 ton/tahun. Beberapa jenis perikanan laut ditangkap oleh nelayan Panai Hilir meliputi ikan, teri, udang, kerang, cumi, sotong, kepiting, dan rajungan. Besarnya sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Labuhanbatu belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Panai Hilir. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan berhubungan erat dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan tangkapan ikan. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan sektor perikanan antara lain meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan masyarakat pesisir.

1.2. Maksud Kegiatan

Kegiatan penelitian Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan sebagai bahan panduan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat melalui Laporan Akhir Kegiatan.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bersama pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam



mengembangkan usahanya perikanan tangkap di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Tujuan ini akan dicapai melalui 3 tahapan antara lain:

1. Untuk menganalisis tingkat pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir,
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir
3. Untuk mengetahui strategi dan arahan kebijakan kelembagaan yang terkait dengan perikanan di Kecamatan Panai Hilir.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Menganalisa Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu
- b. Terwujudkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah
- c. Tersedianya informasi yang akurat tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu
- d. Tersedianya informasi dalam bentuk Laporan akhir kegiatan yang dapat digunakan oleh pemerintah.

1.5. Manfaat

Pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang berisi Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat luas dan nelayan terkait Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang akurat sehingga mendorong peningkatan kapasitas usaha dan kreativitas masyarakat nelayan.
- b. Sebagai referensi pengembangan dunia usaha untuk masyarakat nelayan juga bagi pemerintah dalam merencanakan pengembangan peningkatan tingkat pendapatan nelayan.



1.6. Ruang Lingkup

1.6.1. Lingkup Wilayah

Ruang lingkup penelitian ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir, khususnya pengaruh modal, tenaga kerja, pengalaman, harga ikan, dan jumlah tangkapan. Nelayan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah nelayan buruh, nelayan yang menggunakan perahu motor tempel dan nelayan pemilik perahu dayung.

1.6.2. Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selama 3 (tiga) bulan kalender.



II. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

- a) Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut atau pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b) Dari cara segi hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga kerja yang banyak.
- c) Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional (Sastrawidjaya, 2002).

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran *modernitas* bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan.



Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka (Imron, 2003).

Pada umumnya dalam pengusahaan perikanan laut terdapat tiga jenis nelayan, yaitu; nelayan pengusaha, nelayan campuran, dan nelayan penuh. Nelayan pengusaha yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman modalnya dalam operasi penangkapan ikan. Nelayan campuran yaitu seseorang nelayan yang juga melakukan pekerjaan yang lain di samping pekerjaan pokoknya sebagai nelayan. Sedangkan nelayan penuh ialah golongan nelayan yang hidup sebagai penangkap ikan di laut dan dengan memakai peralatan lama atau tradisional. Namun demikian apabila sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari perikanan (darat dan laut) ia disebut sebagai nelayan (Mubyarto, 2002).

Sejalan dengan itu, dalam hal tingkat pendidikan khususnya bagi nelayan tradisional, untuk bekal kerja mencari ikan dilaut, latar belakang seorang nelayan memang tidak penting artinya karena pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah memberikan pengaruh terhadap kecakapan mereka dalam melaut. Persoalan dari arti penting tingkat pendidikan ini biasanya baru mengedepankan jika seorang nelayan ingin berpindah ke pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah jelas kondisi itu akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain mejadi nelayan (Kusnadi, 2003).

2.1.2. Teori Pendapatan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah pendapatan. Pendapatan juga merupakan hal yang paling mendasari seseorang melakukan suatu pekerjaan. Hal ini menandakan bahwa suatu usaha memang layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan karena bisa menghasilkan pendapatan bagi kehidupan pekerjanya. Pendapatan dikatakan stabil bagi perekonomian seseorang apabila jumlahnya lebih besar dari pengeluaran harian orang tersebut.



Pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan kotor usaha tani (*gross farm income*) disebut sebagai nilai produksi (*value of production*) sedangkan penerimaan kotor (*gross return*) adalah nilai produksi usaha tani dalam bentuk tertentu baik yang dijual maupun tidak dijual.

Pendapatan bersih atau keuntungan merupakan selisih antara pendapatan kotor dengan pengeluaran total. Secara teknis, keuntungan dihitung dari hasil pengurangan antara total penerimaan (*total revenue*) dengan total biaya (*total cost*). Dimana dalam analisis ekonomi biaya juga digolongkan menjadi 2 yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*).

Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002). Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

- a. Mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut atau pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama.
- b. Segi hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga kerja yang banyak.
- c. Keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.

Penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut lainnya merupakan mata pencaharian pokok usaha nelayan. Pada dasarnya usaha penangkapan ikan yang dilakukan usaha nelayan secara teknis ekonomis merupakan suatu proses produksi



yang bersifat ekstraktif, yakni mengambil hasil alam tanpa mengembalikan sebagian hasilnya untuk keperluan produksi dikemudian hari, (Mubyarto, 1985).

2.1.3. Teori Produksi

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlah dianggap tidak mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja (Sukirno, 2004).

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Produksi atau memproduksi menambah kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Lebih spesifik lagi produksi adalah kegiatan perusahaan dengan mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output dengan biaya yang minimum (Joesron dan Fathorrozi, 2003).

Produksi merupakan konsep arus. Apa yang dimaksudkan dengan konsep arus disini adalah produksi merupakan kegiatan yang diukur sebagai tingkat-tingkat output per unit priode/waktu. Sedangkan outputnya sendiri senantiasa diasumsikan konstan kualitasnya. Jadi bila kita berbicara mengenai peningkatan produksi, itu berarti peningkatan output dengan mengasumsikan faktor-faktor lain yang sekiranya berpengaruh tidak berubah sama sekali (konstan). Pemakaian sumber daya dalam suatu proses produksi juga diukur sebagai arus. Modal dihitung sebagai sediaan jasa, katakanlah mesin per jam, jadi bukan dihitung sebagai jumlah mesinnya secara fisik (Miller dan Miners, 1999).

2.1.4. Fungsi Produksi

Menurut Joesron dan Suhartati (2003), produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah



mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input dan output tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik merupakan fungsi produksi. Jadi, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu.

Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Kalau salah satu faktor tidak tersedia maka proses produksi tidak akan berjalan, terutama tiga faktor yaitu tanah, modal, dan manajemen, tentu proses produksi atau usahatani tidak akan jalan karena tidak ada tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, apa yang dapat dilakukan, begitu juga dengan faktor lainnya seperti modal. Hubungan antara jumlah output (Q) dengan jumlah input yang digunakan dalam proses produksi ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Q = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$$

Dimana :

Q = output

X_i = input

Input produksi sangat banyak dan yang perlu dicatat disini bahwa input produksi hanyalah input yang tidak mengalami proses nilai tambah. Jadi didalam fungsi produksi diatas tidak biasa dimasukkan material sebab dalam fungsi produksi ada substitusi antara faktor produksi. Hubungan antara input dan output ini dalam dunia nyata sangat sering kita jumpai. Hubungan antara input dan output dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, sekalipun ada disekitar kita, belum banyak yang memahami berbagai model yang dapat diterapkan untuk mempelajari pola hubungan antara input dan output.\



2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Usaha nelayan adalah orang yang melakukan penangkapan di laut dan di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut (Tarigan, 2000). Jadi bila ada yang menangkap ikan di tempat budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau, sungai tidak termasuk nelayan. Selanjutnya, menurut Tarigan (2000), rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang terefleksi dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal misalnya pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang berani mengambil resiko, cepat puas dan kebiasaan lainnya yang tidak mengandung modernisasi. Selain itu kelemahan modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh pola pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan kemiskinan rumah tangga nelayan lapisan bawah antara lain proses produksi didominasi oleh toke pemilik perahu atau modal dan sifat pemasaran produksi hanya dikuasai kelompok tertentu dalam bentuk pasar monopsoni (Kusnadi, 2003).

Ada tiga faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha nelayan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Teknologi

Peralatan yang digunakan oleh nelayan dalam penangkapan ikan (produksi) adalah alat penerangan (lampu) dan jaring.

Peralatan atau modal usaha nelayan adalah nilai dari pada peralatan yang digunakan seperti:

- Harga perahu, apakah mempergunakan mesin besar atau kecil yang dimiliki nelayan.
- Harga dari peralatan penangkapan ikan, misalnya jaring dan lain-lain.
- Tenaga kerja, banyak atau sedikit tenaga kerja yang digunakan dalam melaut (menangkap ikan).



2. Sosial Ekonomi

- Umur

Seseorang yang telah berumur 15 tahun ke atas baru disebut sebagai nelayan, dibawah umur tersebut walaupun ia melaut tidak disebut sebagai nelayan. Umur juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar.

- Pengalaman

Apabila seseorang dianggap nelayan yang telah berumur 15-30 tahun, diatas 30 tahun dianggap sebagai nelayan yang berpengalaman. Hal ini merupakan kategori atau klasifikasi untuk menentukan banyak jumlah tangkapan ikan dilaut.

- Musim

Musim sangat berpengaruh kepada keadaan kehidupan nelayan yaitu musim barat dan musim timur. Dalam satu tahun ada dua musim yaitu musim timur dari bulan Maret sampai Agustus, umumnya gelombang besar, pasang tinggi, arus deras, curah hujan selalu terjadi, keadaan demikian ini pada umumnya nelayan sangat jarang ke laut karena takut bahaya, jadi produksi sedikit dan harga ikan akan tinggi. Pada musim barat biasanya dari September sampai Februari keadaan pasang tidak terlalu tinggi, arus tidak terlampau deras, gelombang tidak terlampau besar. Pada musim inilah nelayan banyak mendapat ikan. Di samping kedua musim tersebut dalam setahun, ada lagi pengaruh musim bulanan yaitu pada bulan purnama. Pada bulan purnama atau terang arus akan deras dan pasang akan tinggi. Sebaliknya pada bulan gelap, gelombang akan kecil, arus tidak bergerak yang disebut dengan istilah pasang mati. Pada kedua keadaan ini nelayan akan kurang mendapatkan ikan dan harga ikan akan tinggi apalagi pada musim timur keadaan ini umumnya nelayan tidak akan turun melaut, walaupun turun melaut hanya dipinggir saja.



Kegiatan spekulatif dalam penangkapan ikan semakin meningkat ketika kondisi tangkap melanda. Dalam keadaan yang demikian, sulit membedakan antara masa musim ikan dan masa paceklik (Kusnadi, 2003).

3. Tata Niaga

Ikan adalah komoditi yang mudah rusak dan busuk, jadi penyampaiannya dari produsen (nelayan) kepada konsumen harus cepat agar kualitas atau kondisinya tidak rusak atau busuk kalau ikan itu diolah. Kondisi atau keadaan ikan ini sangat berpengaruh kepada harga ikan, demikian juga nilai gizinya. Jadi dalam hal ini dilihat nilai efisiensi dari penggunaan tata niaga perikanan tersebut, dari produsen ke konsumen berarti semakin baik dan semakin efisien tata niaganya dan kriterianya adalah sebagai berikut :

- Panjang atau pendeknya saluran distribusi yang dilalui oleh hasil produksi dalam hal ini ikan dari nelayan sampai kepada konsumen. Banyak atau sedikitnya dari jumlah pos-pos yang terdapat pada saluran distribusi tersebut. Apabila banyak mengakibatkan panjang (jauhnya) jarak antara produsen dan konsumen akhir yang artinya makin tidak efisien.
- Menambah keuntungan atau tidak yaitu setiap pos saluran distribusi tersebut apakah menambah keuntungan atau tidak bagi nelayan. Dalam hal ini kita bandingkan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dan meneliti apakah ada korelasi antara hal-hal diatas tadi akan menambah atau memperbesar pendapatan nelayan. Meningkatnya tangkapan nelayan berarti meningkatkan kesejahteraan nelayan tersebut. Demikian juga hal tersebut menunjang program pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan.

2.2.1 Modal dan Biaya Produksi

Menurut Milton Friedman, uang merupakan salah satu bentuk kekayaan seperti halnya bentuk-bentuk kekayaan yang lain, misalnya surat berharga, tanah, dan keahlian. Bagi seorang pengusaha, uang merupakan barang yang produktif. Apabila uang tersebut dikombinasikan dengan faktor produksi yang lain, pengusaha



dapat menghasilkan barang. Dengan demikian, teori permintaan uang dapat pula dipandang sebagai teori tentang modal (*Capital Theory*).

Friedman memberikan definisi kekayaan meliputi segala sesuatu yang merupakan sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan ini berasal dari diri manusia itu sendiri, yaitu keahlian (*skill*). Milton Friedman ternyata membagi kekayaan dengan lima kategori, yaitu uang, kas obligasi, saham, kekayaan yang berbentuk fisik, dan kekayaan yang berbentuk manusia atau keahlian (*skill*).

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan di tabung dan di investasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stock modal secara fisik (yakni nilai riil atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal ini jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa mendatang (Sukirno, 2000).

Manusia selalu memiliki aset (modal) yang dengan modal itu dia bisa mempertahankan hidup dengan baik. Bahkan orang yang paling miskin sekalipun selalu memiliki aset kehidupan atau sumber daya dimana dengan itu mereka bergantung. Usaha untuk membuat kehidupan yang lebih terjamin dan berkelanjutan haruslah dibangun diatas pemahaman terhadap aset-aset yang telah dimiliki dan sejauh mana mereka dalam menggunakan dan mengembangkan aset tersebut. Adapun modal tersebut adalah modal sumber daya alam, modal ekonomi, modal fisik dan modal sosial (Mukherjee, 2001).

Modal ada dua macam, yaitu modal tetap dan modal bergerak. Modal tetap diterjemahkan menjadi biaya produksi melalui *depreciation cost* dan bunga modal. Modal bergerak langsung menjadi biaya produksi dengan besarnya biaya itu sama dengan nilai modal yang bergerak.

Setiap produksi subsektor perikanan dipengaruhi oleh faktor produksi modal kerja. Makin tinggi modal kerja per unit usaha yang digunakan maka diharapkan produksi ikan akan lebih baik, usaha tersebut dinamakan padat modal atau makin



intensif. Sebagian dari modal yang dimiliki oleh nelayan digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi, yaitu penyediaan input produksi, biaya operasi dan biaya-biaya lainnya dalam suatu usaha kegiatan nelayan. Biaya produksi atau biaya operasi nelayan biasanya diperoleh dari kelompok nelayan kaya ataupun pemilik modal, karena adanya hubungan pinjam-meminjam uang sebagai modal kerja dimana pada musim panen hasil tangkap (produksi) ikan nelayan digunakan untuk membayar seluruh pinjaman/utang, dan tingkat harga ikan biasanya ditentukan oleh pemilik modal.

Total biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variabel cost*). Biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun hasil tangkapan ikan (produksi) diperoleh banyak atau sedikit. Biaya variabel (VC) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan (produksi) yang diperoleh, contohnya biaya untuk tenaga kerja. Total biaya (TC) adalah jumlah dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC), maka $TC = FC + VC$ (Rahardja, Manurung, 2006).

2.2.2. Faktor Tenaga Kerja

Teori Keynes mengatakan cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperbanyak investasi, misalnya mesin karena mesin butuh operator otomatis akan menyerap tenaga kerja. Selain itu konsumsi harus sama dengan pendapatan, karena banyaknya tingkat konsumsi akan memerlukan juga banyak output sehingga otomatis harus menambah perkerja, apabila outpunya banyak otomatis gaji para pekerja akan naik sehingga daya beli mereka meningkat (Noer, 2009).

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam produksi, karena tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input yang lain, tanpa adanya tenaga kerja maka faktor produksi lain tidak akan berarti. Dengan meningkatnya produktifitas tenaga kerja akan mendorong peningkatan produksi sehingga pendapatan pun akan ikut meningkat.



Aset utama para usaha nelayan, hanya tenaga kerja dan keterampilan, serta kreatifitas yang relatif masih rendah. Meskipun pekerjaan sebagai nelayan cepat mendatangkan hasil, tetapi seringkali penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Usaha nelayan mempunyai peranan yang sangat substansial dalam modernisasi kehidupan manusia. Mereka termasuk *agent of development* yang saling reaktif terhadap perubahan lingkungan. Sifat yang lebih terbuka dibanding kelompok masyarakat yang hidup di pedalaman, yang menjadi stimulator untuk menerima perkembangan modern.

Berbicara masalah tenaga kerja di Indonesia dan juga sebagian besar negara-negara berkembang termasuk negara maju pada umumnya merupakan tenaga kerja yang dicurahkan untuk usaha nelayan atau usaha keluarga. Keadaan ini berkembang dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia dan semakin majunya suatu kegiatan usaha nelayan karena semakin maju teknologi yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan, sehingga dibutuhkan tenaga kerja dari luar keluarga.

Setiap usaha kegiatan nelayan yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas kapal motor yang dioperasikan sehingga akan mengurangi biaya melaut (lebih efisien) yang diharapkan pendapatan tenaga kerja akan lebih meningkat, karena tambahan tenaga tersebut profesional (Masyhuri, 1999). Oleh karena itu dalam analisa ketenagakerjaan usaha nelayan, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai dalam besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai.

2.2.3. Faktor Pengalaman

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (Trijoko, 1980).

Pengalaman sebagai nelayan secara langsung maupun tidak, memberikan pengaruh kepada hasil penangkapan ikan. Semakin lama seseorang mempunyai



pengalaman sebagai nelayan, semakin besar hasil dari penangkapan ikan dan pendapatan yang diperoleh (Yusuf, 2003).

Faktor pengalaman, faktor ini secara teoritis dalam buku, tidak ada yang membahas bahwa pengalaman merupakan fungsi dari pendapatan atau keuntungan. Namun, dalam aktivitas nelayan dengan semakin berpengalaman dalam menangkap ikan bisa meningkatkan pendapatan atau keuntungan.

2.2.3.1. Pengukuran Pengalaman Kerja

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu :

- a. Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

- b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

- c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek – aspek teknik peralatan dan tehnik pekerjaan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan yang berpengalaman akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, gerakannya berirama, lebih cepat menanggapi tanda – tanda, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta dipengaruhi faktor lain yaitu : lama waktu/masa kerja seseorang, tingkat



pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki dan tingkat penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Oleh karena itu seorang karyawan yang mempunyai pengalaman kerja adalah seseorang yang mempunyai kemampuan jasmani, memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja serta tidak akan membahayakan bagi dirinya dalam bekerja (Foster, 2001).

2.2.4. Faktor Teknologi

Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala, jaring, pukat, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya dikategorikan sebagai seorang yang berprofesi menangkap ikan dengan alat yang lebih modern ialah kapal ikan dengan alat tangkap modern.

Semakin canggih teknologi yang digunakan nelayan maka akan semakin meningkatkan produktifitas hasilnya lebih meningkatkan produksi, yang didalamnya tersirat kesimpulan bahwa masyarakat akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Keberadaan nelayan digolongkan menjadi 4 tingkatan dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar dan karakteristik pasar. Keempat kelompok tersebut, antara lain nelayan tradisional (*peasant-fisher*) yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri; *post peasant-fisher* atau nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju, seperti motor tempel atau kapal motor; *commercial fisher* atau nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan, dan *industrial fisher* yang memiliki beberapa ciri, seperti terorganisasi, padat modal, pendapatan lebih tinggi, dan berorientasi ekspor, (Satria, 2002).

2.3. Faktor Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun



dalam bidang ekonomi, politik dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Kartasasmita, 1996)

2.4. Program Bantuan Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Nelayan

2.4.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dimulai sejak tahun 2001 yang dirancang untuk mengatasi persoalan kemiskinan pada masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Program PEMP 2001-2003 dilancarkan dengan pemberian dana hibah langsung kepada Koperasi Nelayan atau Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk untuk mengelola kebutuhan permodalan nelayan. Kebijakan tahun 2006 mengalami perubahan yaitu berupa pemberian dana hibah tidak langsung lagi kepada koperasi nelayan atau Lembaga Keuangan Mikro nelayan, tetapi dana hibah tersebut dijadikan agunan kredit koperasi pada lembaga perbankan untuk memperoleh fasilitas kredit yang diberi nama Dana Ekonomi Produktif (DEP). Dan pada tahun 2008 koperasi nelayan sudah diarahkan agar berhubungan sendiri dengan lembaga perbankan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (disingkat KUR) dengan suku bunga kredit umum dari lembaga perbankan dan harus disertai dengan jaminan kebendaan (KKP).

2.4.2. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap (PUMP)

Sesuai dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”, maka salah satu strategi untuk mencapai misi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.



PUMP fokus pada kelompok sasaran. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2011 pembinaan nelayan skala kecil adalah memadukan pembinaan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Penerima Program PNPM Mandiri Perikanan Tangkap dan Kelompok Nelayan.

Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Oleh karena itu mulai tahun 2011 kegiatan pemberdayaan nelayan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai kelanjutan pembinaan nelayan penerima BLM pada kegiatan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan tahun 2009-2010 yang dalam hal ini dilaksanakan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.

Pelaksanaan PUMP Perikanan Tangkap kedepan menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya pemberdayaan usaha nelayan skala kecil berbasis desa nelayan.

a. Tujuan PUMP

PUMP Perikanan Tangkap bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di perdesaan sesuai dengan potensi sumberdaya ikan.
2. Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di perdesaan.
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

b. Sasaran PUMP

Sasaran PUMP Perikanan Tangkap sebagai berikut:

1. Berkembangnya usaha 1.000 KUB Perikanan Tangkap.
2. Meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB penerima BLM.



2.4.3. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP)

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana salah satunya melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam wadah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Program PUMP P2HP dilaksanakan atas dasar amanat Menteri Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 21/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. (KKP)

2.4.4. Peningkatan Kehidupan Nelayan

Program PKN merupakan bagian dari percepatan perluasan program Pro-Rakyat (Klaster 4) berupa intervensi pemerintah secara langsung untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sesuai dengan Direktif Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 13 Februari 2011 di Bogor. Melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai Ketua Kelompok Kerja Program PKN yang beranggotakan 12 kementerian/lembaga. Kriteria lokasi program peningkatan kehidupan nelayan adalah berbasis pangkalan pendaratan ikan (PPI) dengan target Rumah Tangga Sasaran (RTS) Nelayan miskin (sangat miskin, miskin, dan hampir miskin). Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan overlay data nelayan miskin di pesisir dan lokasi 816 Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan pelaksanaan program dilaksanakan secara bertahap dengan rincian 100 PPI pada tahun 2011, 400 PPI untuk tahun 2012, 200 PPI untuk tahun 2013 dan 116 PPI untuk tahun 2014. Pelaksanaan kegiatan PKN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu individu nelayan, kelompok nelayan dan sarana dan prasarana di PPI dengan kegiatan dengan kegiatan antara lain : Pembuatan Rumah Sangat Murah, Pekerjaan Alternatif dan Tambahan Bagi Keluarga Nelayan, Skema UMK dan KUR, Pembangunan SPBU Solar, Pembangunan *Cold Storage*,



Angkutan Umum Murah, Fasilitas Sekolah dan Puskesmas, Fasilitas Bank
“Rakyat”.(KKP).



III. METODOLOGI

3. 1. Waktu dan Lokasi Kajian

Jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan kegiatan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

3. 2. Desain Kajian

Dalam rangka penyusunan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, maka ditentukan desain kajian yang dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara serta pengisian kuesioner oleh responden. Metode penunjang lain yang digunakan yaitu studi literatur.

a. Metode Observasi

Dengan metode ini dilakukan pengamatan dan pencarian data secara langsung terhadap kondisi dan potensi kawasan. Dalam studi ini peneliti melakukan pengamatan dengan melihat kejadian secara terencana dan langsung pada tujuan (obyek yang diteliti) guna menghimpun data pada saat kejadiannya.

b. Metode Wawancara

Melalui metode ini didapatkan data-data pelengkap lain yang diperlukan dalam penelitian secara langsung dari stakeholder terkait. Teknik wawancara yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara dengan memakai panduan wawancara (*interview guide*) pada kelompok responden yang telah ditentukan yaitu responden pakar.

c. Studi Literatur

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan tema dan mendukung pengerjaan penelitian ini.



3.3. Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh yang digunakan dalam mengumpulkan data pada kajian ini adalah *purposive sampling*. Pada kajian ini yang menjadi responden adalah pakar dan key informan. Responden diberikan informasi yang rinci oleh peneliti dalam tahap pengumpulan data. Responden adalah orang yang memiliki kapasitas berdasarkan kepakaran terkait pengembangan potensi unggulan investasi. Metode *purposive sampling* ini menentukan para pakar yang dijadikan responden dalam menentukan bobot nilai dari kriteria kebijakan. Pada penelitian ini responden pakar terdiri dari kalangan akademisi, peneliti, birokrat pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya.

3.4. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini adalah pendapatan nelayan (sebagai variabel terikat) yang dipengaruhi oleh modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja dan teknologi (sebagai variabel bebas).

Variabel terikat (dependen variabel) adalah pendapatan usaha nelayan yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.

Variabel bebas (independent variabel) adalah modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja dan teknologi.

Faktor modal kerja masuk kedalam penelitian karena secara teoritis modal kerja mempengaruhi pendapatan usaha. Peningkatan dalam modal kerja akan mempengaruhi pendapatan usaha. Peningkatan dalam modal kerja akan mempengaruhi peningkatan jumlah tangkapan ikan/ produksi sehingga akan meningkatkan pendapatan. Modal kerja adalah modal yang digunakan nelayan untuk melaut, misalnya : bahan bakar (solar), pengawet ikan (es balok).

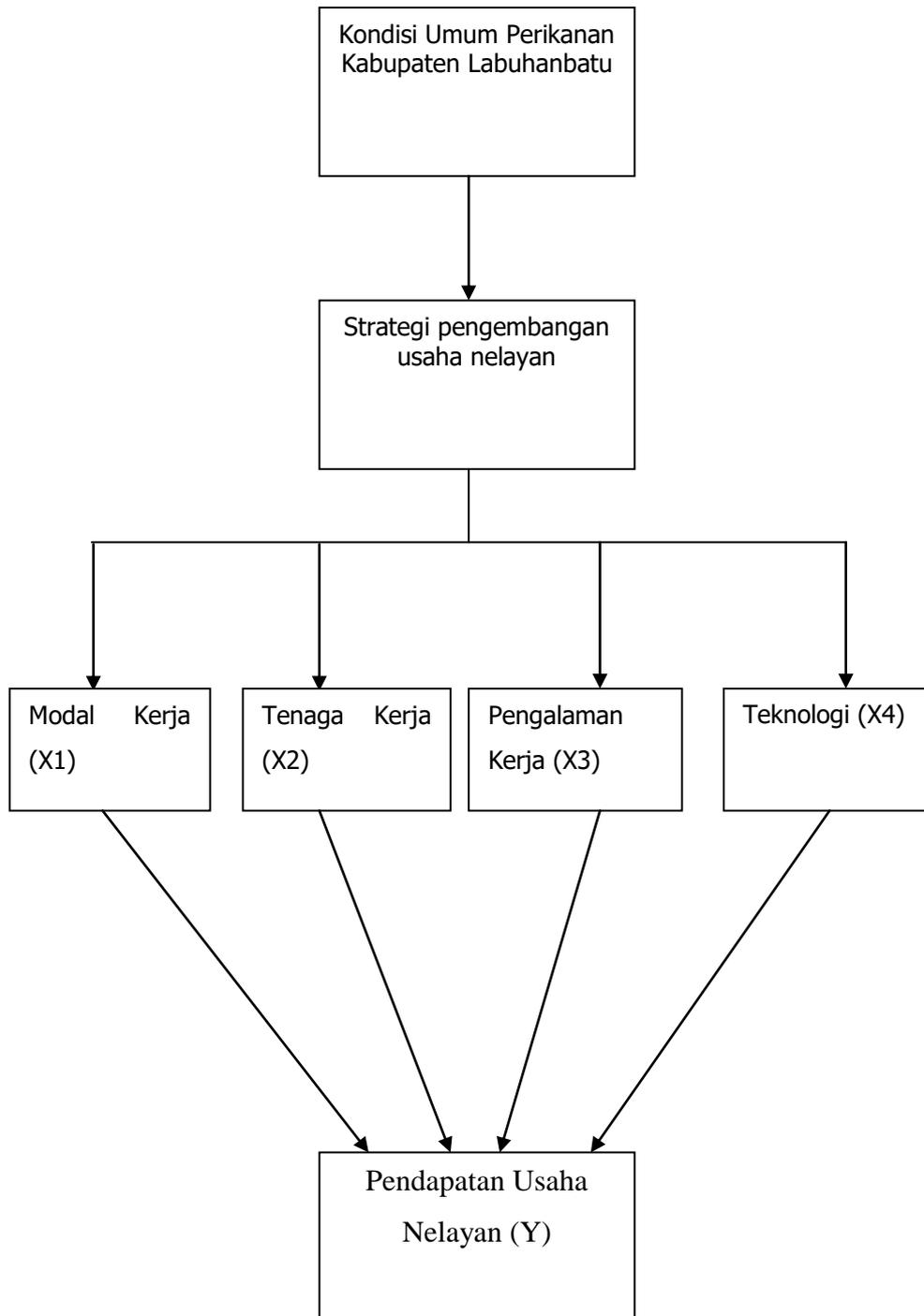
Faktor tenaga kerja masuk dalam penelitian ini karena secara teoritis tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatan usaha. Tenaga kerja yang dimaksudkan disini adalah banyaknya orang yang pergi melaut dalam satu perahu atau kapal usaha nelayan.



Faktor pengalaman kerja, faktor ini secara teoritis dalam buku tidak ada yang membahas pengalaman merupakan fungsi dari pendapatan atau keuntungan. Namun, dalam prakteknya, nelayan yang semakin berpengalaman dalam melaut bisa meningkatkan pendapatannya, dikarenakan orang yang berpengalaman dapat mengetahui lokasi dimana saja ikan-ikan bergerombolan disaat tertentu.

Faktor teknologi, semakin canggih teknologi yang digunakan nelayan maka akan semakin meningkatkan produktifitas hasilnya lebih meningkatkan produksi, yang didalamnya tersirat kesimpulan bahwa masyarakat akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Dengan demikian kerangka pikir penelitian hubungan antara modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja dan teknologi terhadap pendapatan usaha nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran



3. 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan

Data faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber dan instansi yang terkait antara lain dari Badan Pusat Statistik, Dinas Perikanan, Bappeda dan instansi terkait lainnya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan *stakeholder* terkait. Adapun secara lengkap data yang diperlukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pengumpulan Data

Sumber Data	Jenis Data	Metode Pengambilan
Data Primer		
	Umur Nelayan	Kuesioner
	Pendidikan Nelayan	Kuesioner
	Pendapatan Nelayan	Kuesioner
	Jumlah hari melaut/trip	Kuesioner
	Teknologi yang digunakan	Kuesioner
	Ukuran mesin/ukuran kapal	Kuesioner
Data sekunder		
SKPD terkait	Aspek potensi dan lokasi	Studi Literatur
	Aspek ketersediaan lahan	Studi Literatur
	Aspek ketersediaan bahan baku	Studi Literatur
	Aspek pendukung	Studi Literatur
	Aspek kelembagaan dan perizinan	Studi literatur
	Aspek sosial dan lingkungan	Studi Literatur
	Aspek Manajemen Organisasi	Studi Literatur
	Aspek teknis	Studi literatur
	Aspek hukum/kebijakan	Studi Literatur
	peluang pasar	Studi Literatur
	kawasan industri	Studi Literatur
	Kawasan khusus	Studi Literatur

3. 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan menjelaskan pengaruh antara modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja dan teknologi terhadap pendapatan usaha nelayan di Kabupaten Labuhanbatu yang drumuskan dalam fungsi :

$$Y = F (X_1, X_2, X_3, X_4).....(3.1)$$



Dimana:

- Y = pendapatan usaha nelayan
- X₁ = modal kerja
- X₂ = tenaga kerja
- X₃ = pengalaman kerja
- X₄ = teknologi

Dalam analisis ini pendekatan yang dilakukan adalah analisis fungsi produksi, dimana fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output. Bentuk fungsi produksi yang digunakan adalah :

$$Y = AX_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} X_4^{\beta_4} \dots\dots\dots(3.2)$$

Selanjutnya fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk ekonometrikanya sebagai berikut :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \mu \dots\dots\dots(3.3)$$

Dimana :

- Y = pendapatan usaha nelayan
- X₁ = modal kerja
- X₂ = tenaga kerja
- X₃ = pengalaman kerja
- X₄ = teknologi
- β₀ = intercept
- β₁ = koefisien regresi, i = 1, 2, 3, dan 4
- μ = *error term* (kesalahan pengganggu)

3.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi pengujian serempak (uji-f), pengujian individu (uji-t), dan pengujian ketetapan perkiraan (R²), uji asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedasitas, autokorelasi dan normalitas.

3.7.1. Uji Statistik

1. Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi



digunakan untuk menghitung seberapa besar varian dan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Nilai R^2 paling besar 1 dan paling kecil 0 ($0 < R^2 < 1$). Bila R^2 sama dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0.

Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R^2 untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat data. Untuk data servei yang berarti bersifat *cross section*, data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai $R^2 = 0,3$ sudah cukup baik.

2. Pengujian Signifikan Simultan (Uji f-test statistik)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja, teknologi) terhadap variabel dependen (pendapatan nelayan).

3. Pengujian Signifansi Parameter Individual (Uji t-test statistik)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut: $H_1 : \beta_1 = 0 \rightarrow$ tidak berpengaruh, $H_1 : \beta_1 >$



$0 \rightarrow$ berpengaruh positif, $H_1 : \beta_1 < 0 \rightarrow$ berpengaruh negative. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . bila thitung $<$ ttabel maka H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linear (Gujarati, 1991). Untuk mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan Eviews-7.0 dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas (*Correlation Matrix*).

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya dilihat dalam pengujian terhadap nilai *Durbin Watson (Uji DW)* yang dibandingkan dengan nilai d_{tabel} .

3. Uji Heteroskedasitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedasitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedasitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati dan Porter, 2003). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity* yang tersedia dalam program Eviews 7.0.



4. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel.

3.8. Analisis SWOT

SWOT adalah alat yang diterapkan secara luas dalam mendukung keputusan strategis. Pada analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang paling penting dikelompokkan menjadi empat kategori: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Dengan menerapkan SWOT dalam proses perencanaan strategis, tujuannya biasanya adalah untuk mengembangkan dan mengadopsi strategi sehingga cocok antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Dalam rangka menentukan arah strategi pengembangan usaha perikananpotensi unggulan investasi digunakan Analisis SWOT, yaitu analisis kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka memformulasikan strategi suatu kegiatan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT ini adalah:

- Identifikasi Kekuatan/Kelemahan dan Peluang/Ancaman
- Analisis SWOT
- Alternatif Arah Kebijakan Hasil Analisis SWOT.

Analisis dalam matriks SWOT, dihasilkan empat kelompok besar kemungkinan alternatif rancangan strategi yaitu:

1. Strategi SO yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST, yaitu strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO, yaitu pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.



4. Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dari berbagai alternatif strategi, dipilih strategi prioritas, pilihan strategi prioritas ini menjadi dasar penyusunan rancangan program pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten LabuhanBatu. Strategi pengembangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT Analysis (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Unsur-unsur SWOT dihubungkan dalam suatu Matriks SWOT untuk memperoleh alternatif strategi (SO, ST, WO, WT). Setiap alternatif strategi tersebut dijumlahkan bobot nilainya untuk menghasilkan ranking alternatif strategi. Strategi dengan bobot nilai tertinggi merupakan strategi prioritas untuk dilaksanakan.

Tabel 3.1. Matriks Analisis SWOT

Internal Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	<u>Strategi – SO</u> Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	<u>Strategi – ST</u> Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<u>Strategi – WO</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.	<u>Strategi – WT</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

3.9. Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan ini bertujuan untuk memotret situasi kelembagaan yang sudah ada. Menurut Ostrom et al. (1994), kelembagaan sebagai alat untuk mengarahkan, mengharmonisasikan, mensinergikan atau membatasi perilaku manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri, oportunistis dan tidak mau bekerjasama. Fokus analisis adalah perilaku manusia yang ada dalam suatu arena aksi (masyarakat nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten LabuhanBatu). Arena aksi ini meliputi situasi aksi (aktifitas masyarakat sehari-hari mencakup siapa saja yang berpartisipasi, posisinya dalam aktifitasnya, aksi/aktifitas yang



dilakukannya, apa saja yang bisa dihasilkannya dari aktifitas tersebut, serta aktor/pelaku aksi (pemerintah, nelayan dan pengusaha).

Selain proses pengumpulan data, analisis ini juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan dimensi sosial ditinjau dari perspektif keberlanjutannya. Perspektif keberlanjutan dari dimensi sosial antara lain dengan melakukan analisis keadaan sosial serta atribut-atribut yang mempengaruhi keberlanjutan perikanan dari sisi sosial. Objek yang diteliti khususnya adalah usaha perikanan tangkap yang terkait dengan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam rangka menentukan stakeholder yang benar-benar berkompeten dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan digunakan *stakeholder analysis* yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merujuk pihak (seseorang) yang tepat atau berpengaruh pada aktivitas suatu program. Sejumlah *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan pengembangan perikanan masing-masing dipetakan berdasarkan penilaian atas tingkat kepentingan (*importance*) dengan pengambil keputusan dari substansi kebijakan yang akan diputuskan dan tingkat pengaruhnya (*influence*) pada proses penyusunan kebijakan.

Penilaian ini dilakukan dengan cara pembobotan berdasarkan dua kriteria tersebut, yakni kedekatan kepentingan dan kekuatan atau daya pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat signifikansi mengindikasikan kedekatan kepentingan (prioritas yang diberikan) oleh pengambil keputusan. Semakin dekat kebutuhan dan kepentingan stakeholder bersangkutan dengan prioritas pengambil keputusan maka makin besar signifikansinya. Sedangkan pengaruh stakeholder dapat dipahami dengan cara melihat besar kecilnya kemampuan stakeholder tertentu dalam mempersuasi pihak lain untuk mengikuti kemauannya. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah:

- 1) Membuat tabel stakeholder, yang berisi informasi mengenai:
 - Daftar semua stakeholder yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh program.



- Kepentingan stakeholder (yang tertutup maupun terbuka) dalam kaitannya dengan program dan tujuannya. Kepentingan mengacu pada motif dan perhatian mereka pada kebijakan atau program. Setidaknya terdapat dua kepentingan utama.
 - Sikap stakeholder terhadap kebijakan atau program. Sikap mengacu pada reaksi utama dari berbagai stakeholder dalam memutuskan pandangan terhadap kebijakan.
- 2) Menilai sikap dari stakeholder terhadap kebijakan sebagai berikut: Penilaian sikap menggunakan skala likert dari 3 hingga -3. Nilai 3 artinya sangat mendukung, 2 adalah cukup mendukung, 1 adalah netral, -2 yaitu cukup menentang dan -3 adalah sangat menentang.
 - 3) Membuat penilaian awal tentang tingkat kekuatan dan pengaruh dari masing-masing stakeholder. Kekuatan stakeholder mengacu pada kuantitas sumberdaya yang dimiliki stakeholder yaitu sumberdaya manusia (SDM), finansial dan politik. Penilaian tingkat kekuatan menggunakan skala likert 1 sampai lima (5=sangat kuat, 4=kuat, 3=rata-rata, 2=lemah, dan 1=sangat lemah).
 - 4) Menentukan tingkat pengaruh total yaitu jumlah dari tingkat kekuatan (SDM, finansial dan politik) dari masing-masing stakeholder.
 - 5) Menentukan nilai total yaitu perkalian antara sikap dengan pengaruh untuk setiap stakeholder.
 - 6) Memutuskan kebutuhan keterlibatan stakeholder dalam kebijakan atau program, dimana jika nilai pengaruh kurang dari 10 maka stakeholder dapat diabaikan dan jika lebih dari 10 maka stakeholder harus dilibatkan.
 - 7) Menentukan tingkat keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan, dimana stakeholder dibagi dalam tiga grup, yaitu:
 - Grup 1 dengan nilai total 10–20 adalah pihak penerima informasi.
 - Grup 2 dengan nilai total 21–30 adalah pihak pemberi pertimbangan.
 - Grup 3 dengan nilai total lebih dari 30 adalah pihak pengambil kebijakan.



IV. POTENSI DAERAH DAN KONDISI EKSISTING NELAYAN

4.1. Kondisi Umum Daerah

4.1.1. Letak Geografis

Kecamatan Panai Hilir merupakan salah satu wilayah pantai yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Jarak Kecamatan Panai Hilir ke Ibukota Kabupaten Labuhanbatu yaitu Rantauprapat adalah 125 km dengan waktu tempuh 6 – 7 jam perjalanan yang dapat ditempuh melalui transportasi darat dan laut. Secara rinci terdapat 3 jalur alternatif menuju Kecamatan Panai Hilir sebagai berikut:

1. Dari Rantauprapat menuju Tanjung Sarang Elang menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh perjalanan 4,5 jam, dilanjutkan dengan transportasi laut berupa motor bot selama 2,5 jam dan langsung ke Kecamatan Panai Hilir.
2. Dari Rantauprapat menuju Tanjung Sarang Elang menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh 4,5 jam dilanjutkan dengan transportasi laut berupa motor bot ke Labuhan Bilik selama 30 menit selanjutnya dengan kendaraan darat sepeda motor selama 30 menit.
3. Dari Rantauprapat menuju Kecamatan Panai Hilir menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh perjalanan 7 jam.

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Panai Hilir yang memiliki kendaraan sepeda motor memilih jalur transportasi alternatif ke dua karena waktu perjalanan tempuhnya lebih cepat. Masyarakat yang menggunakan jalur alternatif ke dua yang berasal dari Kecamatan Panai Hilir menitipkan kendaraan mereka di pangkalan Motor Bot Labuhan Bilik sedangkan yang menuju ke Kecamatan Panai Hilir menitipkan kendaraan mereka di pangkalan Motor Bot Tanjung Sarang Elang. Sedangkan untuk jalur transportasi alternatif yang ketiga sangat jarang sekali digunakan masyarakat. Hal ini dikarenakan jarak tempuh yang lama dan fasilitas jalan sebagian besar masih menggunakan jalan tanah. Sehingga apabila musim hujan jalan tersebut tidak dapat difungsikan. Se jauh ini hanya para pendatang dengan mengendarai mobil yang menempuh jalur alternatif ke tiga dan



itupun kalau mobil tersebut dibutuhkan mereka selama berada di Kecamatan Panai Hilir.

Selanjutnya secara administrasi, batas-batas Kecamatan Panai Hilir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Hilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panai Tengah

Luas wilayah Kecamatan Panai Hilir adalah 342,03 Km² yang terbagi dalam 8 desa yaitu; Desa Sei Lumut, Desa Sei Tawar, Desa Sei Berombang, Desa Sei Baru, Desa Penggantungan, Desa Sei Sakat, Desa Sei Sanggul dan Desa Wonosari.

Tabel 1. Luas dan Jumlah Penduduk menurut Desa

No	De sa	Luas (Ha)	%	Jumlah Pendud uk	%
1	Sei Penggantungan	6.730	20	6.513	19
2	Sei Lumut	4.280	13	2.560	7.5
3	Sei Tawar	7.380	22	963	2.8
4	Sei Sanggul	3.203	9.4	5.484	16
5	Sei Berombang	2.940	8.6	11.552	34
6	Sei Sakat	1.350	3.9	2.557	7.5
7	Sei Baru	4.160	12	3.108	9.1
8	Wonosari	4.200	12	1.525	4.5
Jumlah		34.24 3	10 0	34.262	100

Sumber : Labuhanbatu Dalam Angka 2017

Pada Tabel 1 dapat dilihat luas wilayah dan jumlah penduduk setiap desa yang terdapat di Kecamatan Panai Hilir. Desa Sei Tawar merupakan desa yang memiliki wilayah lebih luas dari desa lainnya yaitu 7380 Ha atau 22% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Panai Hilir. Sementara desa Sei Berombang yang merupakan ibukota Kecamatan Panai Hilir hanya memiliki luas wilayah 2940 Ha atau 8,6% dari seluruh luas wilayah Kecamatan. Kendati demikian jumlah penduduk terpadat yaitu 34% dari seluruh jumlah penduduk berdomisili di desa Sei Berombang yang merupakan kota Kecamatan. Sedangkan penduduk yang berdomisili di desa Sei Tawar hanya 2,8% dari seluruh jumlah penduduk.



Hal ini dikarenakan desa Sei Tawar masih sangat terisolir dibanding dengan desa lainnya. Jarak desa Sei Tawar ke Kecamatan 27 km yang hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor dan jalan kaki. Apabila hari hujan perjalanan ke desa tersebut tidak bisa dilakukan. Hal tersebut menyebabkan motivasi seseorang untuk berdomisili di desa Sei Tawar tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah perpindahan penduduk ke luar desa.

Kecamatan Panai Hilir memiliki topografi yang pada umumnya daratan dengan jenis tanahnya bergambut dan alluvial dengan kondisi geografis terletak pada ketinggian 0 – 12 m dari permukaan laut. Wilayah kecamatan Panai Hilir pada umumnya tidak lepas dari pasang surut air laut. Kemudian terdapat banyak sungai-sungai kecil yang dimanfaatkan oleh sebagian nelayan untuk tempat berlabuh motor bot mereka dan tidak jarang sungai-sungai kecil tersebut berada di belakang rumah para nelayan.

4.1.2. Keadaan Sosial Ekonomi

Pada umumnya penduduk Kecamatan Panai Hilir bermata pencaharian sebagai nelayan yang sudah turun temurun. Hal ini dapat ditemukan hampir pada rumah tangga nelayan yang memiliki anak laki-laki dewasa secara langsung terlibat dalam usaha mencari ikan di laut. Bahkan ada anak-anak yang seharusnya duduk di bangku Sekolah Dasar ikut melaut. Biasanya anak-anak nelayan ikut melaut bersama orang tua mereka dengan satu perahu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan mengurangi tenaga buruh yang seharusnya di gaji apabila menggunakan tenaga luar keluarga. Di samping itu dengan menggunakan tenaga keluarga, para orang tua tidak lagi terbebani untuk mengeluarkan uang jajan anak. Karena anak juga akan mendapat bagian dari penjualan hasil tangkapan setiap melaut. Faktor utama penduduk bermata pencaharian di sektor perikanan laut tersebut adalah letak geografis kecamatan Panai Hilir yang merupakan wilayah pantai.

Kecamatan Panai Hilir diwarnai dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang heterogen. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Panai Hilir memeluk agama Islam tetapi sebagian yang lain beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu yang dianut oleh warga keturunan Tionghoa. Demikian pula adat dan budaya masyarakat yang terdiri dari berbagai suku antara



lain; Jawa, Batak Toba, Batak Mandailing dan Batak Melayu masing-masing memiliki kultur yang berbeda-beda. Pada umumnya suku Batak Toba yang beragama Kristen berpusat di sebelah Utara desa Sei Baru. Sedangkan suku Jawa berpusat di Desa Wonosari. Pengelompokan domisili tersebut dilatarbelakangi oleh pola hidup dan strategi nafkah yang berbeda. Warga Batak Toba dan Jawa tersebut memiliki etos kerja yang tinggi sebagai petani dan mereka tidak terlibat dalam aktivitas melaut. Selain itu mereka mengusahakan hewan ternak seperti babi (khusus suku Batak Toba), ayam, dan kambing. Meskipun di satu sisi terlihat kehidupan warga yang berjalan dengan sendiri-sendiri tapi aspek kebersamaan tidak hilang sehingga kehidupan masyarakat berjalan harmonis.

Wilayah Kecamatan Panai Hilir yang dikategorikan sebagai wilayah pantai memberi peluang pada sektor ekonomi yang tidak hanya dari pertanian, perdagangan, dan jasa tapi dilengkapi dengan sektor perikanan laut. Untuk sektor perikanan laut dalam skala besar dikelola oleh warga keturunan Tionghoa. Demikian pula dengan perdagangan sebagian besar di pegang oleh warga Tionghoa yang berdomisili di kota Kecamatan.

Perikanan laut merupakan sektor ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik dari lapisan tingkat umur dan status sosial masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu sektor perikanan laut merupakan salah satu sektor yang memberi stimulus berkembangnya industri pengolahan ikan masyarakat. Adapun sektor jasa yang banyak diusahakan masyarakat adalah transportasi yaitu pekerjaan sebagai ojek dengan kendaraan sepeda motor. Khusus sektor pertanian masyarakat sangat heterogen mulai dari jenis usaha tani subsistem sampai pada usahatani non subsistem. Pemasaran hasil tani masyarakat selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik juga ke luar wilayah melalui jalur laut yaitu ke Tanjung Balai.

Masyarakat kecamatan Panai Hilir dapat dikatakan masyarakat yang sedang mengalami pergeseran dari masyarakat statis menuju masyarakat dinamis. Tapi pergeseran tersebut tidak melihat aspek kehidupan sosial yang sebenarnya bermanfaat dan baik untuk disinergikan dengan kehidupan masyarakat yang mulai berkembang. Budaya materialistis tanpa disadari masyarakat sudah terdapat dalam kehidupan mereka sehari-hari yang berdampak pada kesenjangan ekonomi. Hal



ini bisa disebabkan faktor pola hidup yang boros dari sebagian besar rumah tangga nelayan menjadi potensi tidak terkendalinya ekonomi rumah tangga masyarakat pada umumnya. Di samping itu tatanan hidup yang dianut dengan nilai-nilai tepa selira antar warga mulai hilang seiring dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Fenomena tersebut dapat ditemukan khususnya pada warga kota Kecamatan.

Jumlah penduduk Kecamatan Panai Hilir adalah 37.372 jiwa yang terdiri dari 19.069 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 18.303 penduduk berjenis kelamin perempuan (Kecamatan Panai Hilir dalam Angka 2017). Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk pada setiap Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sei Penggantungan	3.406	3.270	6.676
2	Sei Lumut	1.422	1.366	2.788
3	Sei Tawar	944	955	1.949
4	Sei Sanggul	2.757	2.646	5.403
5	Sei Berombang	6.601	6.334	12.935
6	Sei Sakat	1.227	1.178	2.405
7	Sei Baru	1.563	1.499	3.062
8	Wonosari	1.099	1.055	2.154
	Jumlah	19.06	18.303	37.372

Sumber : *Sumber : Labuhanbatu Dalam Angka 2017*

Tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Panai Hilir secara umum masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan faktor kemiskinan masyarakat baik secara kultural ataupun struktural. Apabila musim ikan datang, anak-anak banyak yang ikut melaut karena mereka terdorong untuk mendapatkan uang saku sehingga motivasi anak untuk sekolah berkurang. Sebagian anak tidak menamatkan Sekolah Dasar mereka karena orang tua mereka menggunakan tenaga anak laki-laki untuk ikut ke laut mencari ikan. Sementara pada kondisi paceklik, banyak anak-anak yang berhenti sekolah karena orang tua tidak sanggup membayar biaya-biaya sekolah.



4.1.3. Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Panai Hilir

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kecamatan Panai Hilir tidak jauh berbeda dengan kecamatan wilayah pantai lainnya yang masih serba terbatas bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang terdapat di wilayah pedalaman. Kebutuhan air bersih untuk kecamatan Panai Hilir sangat terbatas melihat wilayah ini setiap harinya pasang surut. Masyarakat yang tidak memiliki sumur bor hanya mengandalkan air hujan sebagai kebutuhan memasak. Sementara pada musim kemarau mereka harus menambah pengeluaran dengan membeli air untuk mendapatkan air bersih. Sebagian rumah tangga nelayan yang tidak mampu hanya pasrah menggunakan air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-hari baik mandi, mencuci dan memasak. Agar air yang diperoleh masih bisa dimanfaatkan, pengambilan air sungai dilakukan pada waktu air mulai pasang besar.

Proyek pembangunan air bersih yang diberikan pemerintah tidak menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat yang ketika berjalannya proyek kurang dilibatkan sehingga masyarakat merasa kurang memiliki proyek pembangunan tersebut. Di samping itu adanya unsur ekonomi pasar yang berlaku terhadap kebutuhan air bersih sehingga masyarakat yang memiliki kekuasaan dan modal menguasai kelas bawah yang tidak memiliki modal. Kondisi ini ditemukan di lokasi penelitian, dimana kebutuhan terhadap air minum merupakan bisnis yang memberi keuntungan besar. Sehingga kelas atas akan semakin kuat dengan adanya ketergantungan kelas bawah. Sementara kelas bawah akan semakin tertekan dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sarana prasarana untuk pendidikan khususnya Sekolah Dasar kurang memadai. Beberapa gedung Sekolah Dasar sudah kurang layak untuk digunakan. Dapat ditemukan di lokasi penelitian yang berada di desa Sei Baru terdapat Sekolah Dasar Negeri yang sudah tidak layak huni. Secara rinci sarana prasarana yang terdapat di Kecamatan Panai Hilir dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Sarana Prasarana Kecamatan Panai Hilir

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Sekolah Dasar	22
2	SD Swasta	10
3	SMPN	1
4	SMP Swasta	7
5	SMUN	1
6	SMU Swasta	2
7	Puskesmas	1
8	Puskesmas Pembantu	3
9	Posyandu	34
10	Praktek Dokter	1
11	Pasar	1
12	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1
13	Tangkahan Umum	1
Jumlah		85

Sumber : Labuhanbatu Dalam Angka 2017

Sarana dan Prasarana perikanan laut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak berfungsi sama sekali. Proyek pembangunan TPI yang sudah memakan biaya besar tersebut hanya menjadi tempat bermain anak-anak dan tempat nelayan memperbaiki jaring mereka. Nelayan menjual hasil tangkapan mereka di tengah laut dan bila waktu mendarat mereka malam, hasil laut dijual pada pemborong ikan. Pemborong-pemborong ikan biasanya berada di tangkahan-tangkahan.

Sarana telekomunikasi kecamatan Panai Hilir berupa telepon hanya terdapat di ibukota kecamatan yaitu Sei Berombang sedangkan desa lain belum bisa memanfaatkan sarana telekomunikasi berupa telepon. Sementara untuk sarana jalan raya masih kurang memadai. Apabila musim hujan jalan tersebut tidak bisa dilewati dan tidak jarang pedagang -pedagang ikan mengalami kerugian besar.

Fasilitas penerangan dari Pembangkit Listrik Nasional (PLN) telah terdapat di Kecamatan Panai Hilir. Tersedianya sarana penerangan PLN mendorong berkembangnya perekonomian Kecamatan dari sektor jasa seperti; wartel, mesin cuci cetak photo, photo copy, salon dan sebagainya. Tetapi, tidak semua masyarakat Kecamatan Panai Hilir telah menikmati sarana penerangan yang diberikan oleh Pembangkit Listrik Nasional (PLN) tersebut. Desa Sei Tawar merupakan desa yang belum bisa menikmati jasa PLN, sehingga untuk penerangan desa digunakan mesin diesel yang dikelola oleh masyarakat secara



swasta. Demikian pula untuk masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan, meskipun bertempat tinggal di desa yang telah difasilitasi oleh PLN, tidak mampu menikmati fasilitas tersebut. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk penerangan rumah mereka.

4.2. Kondisi Eksisting Masyarakat Nelayan

4.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi

Nelayan di kecamatan Panai kabupaten Labuhan Batu berpendidikan tamat SD hingga SLTA dan semua nelayan menamatkan pendidikan formal, dengan umur antara 25-63 tahun. Profesi sebagai nelayan adalah sebagai sumber penghasilan utama bagi mereka. Pengalaman mereka sebagai nelayan adalah rata-rata diatas 2 tahun.

Pengetahuan mereka tentang pentingnya kelembagaan masih perlu tingkatkan karena belum semua nelayan memiliki kartu nelayan, belum menjadi anggota KUB, Koperasi dan memiliki kartu Cara Penangkapan Ikan yang Baik (CPIB).

4.2.2. Klasifikasi dan Keadaan Usaha Nelayan

Nelayan di kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari nelayan pemilik, pemilik sekaligus sebagai buruh dan nelayan buruh. Nelayan pemilik adalah yang mempunyai modal untuk usaha penangkapan seperti kapal, alat tangkap dan peralatan lainnya sedangkan dia tidak ikut mencari ikan. Ada juga nelayan pemilik sekaligus juga sebagai penangkap ikan. Nelayan buruh adalah nelayan yang menjalankan usaha penangkapan ikan yang seluruh modalnya ditanggung oleh nelayan pemilik modal.

4.2.2.1. Nelayan Buruh

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan pemilik kapal adalah sebagai majikannya atau nakhoda kapal. Mereka bekerja sama dengan pemilik kapal rata-rata hanya pada satu orang. Nelayan adalah pekerjaan utama mereka dan hampir tidak ada pekerjaan sampingan.

Jabatan nelayan buruh dalam kegiatan penangkapan ikan adalah sebagai nakhoda dan anak buah kapal (ABK) dengan lama bekerja rata-rata sudah 1 – 12 bulan. Jumlah trip melaut mereka 1- 24 trip/ bulan , tetapi jumlah trip yang paling



banyak adalah antara antara 7-24 trip perbulan. Jumlah hari melaut nelayan buruh per trip adalah antara 1-3 hari per trip. Sehingga jumlah hari melaut nelayan buruh dalam satu bulan adalah antara 1-24 hari/bulan.

Sistim pembayaran gaji nelayan buruh adalah dengan bagi hasil dan sistim upah tetapi sebagian besar adalah dengan sistim bagi hasil. Pendapatan nelayan buruh adalah antara Rp.110.000 – Rp.2.000.000/ trip

4.2.2.2. Nelayan Motor Tempel

Nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan motor tempel rata-rata tamat SD, belum ada yang sebagian besar belum memiliki kartu nelayan dan tidak ada yang memiliki kartu asuransi dan kartu CPIB serta belum bergabung sebagai anggota koperasi dan KUB .

Modal yang digunakan berasal dari modal sendiri dengan besaran modal untuk 1 unit usaha penangkapan adalah Rp. 10.500.000 – Rp.63.000.000 dan dalam melakukan penangkapan ikan rata-rata menggunakan ABK dengan gaji sistim bagi hasil dengan perbandingan 50% - 80% untuk pemilik .

Jumlah trip melaut mereka 15- 20 trip/ bulan. Jumlah hari melaut nelayan buruh per trip adalah 1 hari per trip, dengan lama waktu bekerja 4 -12 jam perhari. Sehingga jumlah hari melaut nelayan buruh dalam satu bulan adalah antara 15-20 hari/bulan.

Ukuran mesin tempel yang digunakan adalah sebesar 6 - 26 PK dengan ukuran kapal 1,5 – 4 GT. Alat tangkap yang dioperasikan adalah jenis sondong dan pukat Tarik mini. Jenis ikan hasil tangkapan adalah ikan Teri, Udang, Cumi, ikan Senangin, dan lainnya yang dijual dalam bentuk kering dan segar dengan kisaran harga Rp.10.000 – Rp. 60.000. Terdapat kesulitan dalam pemasaran hasil tangkapan terutama karena harga rendah dan lainnya . Pendapatan bersih nelayan dengan motor tempel berkisar antara Rp.88.000 – Rp.475.000 / trip

4.2.2.2.1. Nelayan dengan Kapal motor lebih kecil dari 5 GT

Nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan kapal motor lebih kecil dari 5 GT berpendidikan tamat SD hingga SMA, masih ada yang belum memiliki kartu nelayan, asuransi dan tidak ada yang memiliki kartu CPIB serta belum bergabung sebagai anggota KUB .



Modal yang digunakan berasal dari modal sendiri, pinjaman dari bank dan lainnya. Besaran modal untuk 1 unit usaha penangkapan adalah Rp.13.000.000 – Rp.53.000.000 dan dalam melakukan penangkapan ikan ada yang menggunakan ABK dan tidak menggunakan. Bagi yang menggunakan ABK di gaji dengan sistim bagi hasil dengan perbandingan 50% - 80% untuk pemilik .

Jumlah trip melaut adalah 8- 26 trip/ bulan. Jumlah hari melaut per trip adalah 1 hari per trip, dengan lama waktu bekerja 7-12 jam perhari. Sehingga jumlah hari melaut nelayan buruh dalam satu bulan adalah antara 15-20 hari/bulan.

Ukuran mesin kapal yang digunakan adalah sebesar 1-26 PK dengan ukuran kapal 0,5 – 4 GT. Alat tangkap yang dioperasikan adalah jaring dan pukat tarik. Jenis ikan hasil tangkapan adalah cumi, Udang, Gurita, Senangin, ikan Kembung, dan ikan campur yang dijual dalam bentuk segar dan dijual rata-rata dengan harga rendah. Terdapat kesulitan dalam pemasaran hasil tangkapan terutama karena kualitas rendah, produksi melimpah, harga rendah dan lainnya .

4.2.2.2.2. Nelayan dengan Kapal motor lebih dari 5 GT

Nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan kapal motor lebih dari 5 GT berpendidikan tamat SD hingga SMA, masih ada yang belum memiliki kartu nelayan, asuransi dan tidak ada yang memiliki kartu CPIB serta belum bergabung sebagai anggota KUB .

Modal yang digunakan berasal dari modal sendiri, pinjaman dari bank dan lainnya. Besaran modal untuk 1 unit usaha penangkapan adalah Rp.183.000.000 – Rp.259.000.000 dan dalam melakukan penangkapan ikan ada yang menggunakan ABK dan tidak menggunakan. Bagi yang menggunakan ABK di gaji dengan sistim bagi hasil dengan perbandingan 90% untuk pemilik.

Jumlah trip melaut adalah 10 trip/ bulan. Jumlah hari melaut per trip adalah 1 hari per trip, dengan lama waktu bekerja 12 jam perhari. Sehingga jumlah hari melaut nelayan buruh dalam satu bulan adalah antara 10 hari/bulan.

Ukuran mesin kapal yang digunakan adalah sebesar 60 PK dengan ukuran kapal 7-9 GT. Alat tangkap yang dioperasikan adalah pukat teri dan pukat panjang. Jenis ikan hasil tangkapan ikan teri yang dijual dalam bentuk segar dan dijual rata-rata diluar Tempat pelelangan Ikan (TPI). Terdapat kesulitan dalam



pemasaran hasil tangkapan terutama karena kualitas rendah, produksi melimpah, harga rendah dan lainnya .



V. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN

5.1. Hubungan Antar Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Dari data hasil penelitian yang telah dilaksanakan, untuk tingkat pendapatan nelayan di kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dipengaruhi oleh modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja dan teknologi yang digunakan dalam usaha mereka.

5.1.1. Modal Kerja Terhadap Pendapatan

Dari Tabel 5.1 dengan jumlah 51 responden usaha nelayan di Kecamatan Panai Hilir, jumlah responden terbanyak yaitu 34 orang dengan modal Rp.11.000.000 - Rp.15.000.000 memiliki pendapatan sebesar Rp.21.000.000 - Rp.40.000.000. Responden dengan modal terendah berada pada klasifikasi modal Rp.11.000.000 - Rp.15.000.000 dengan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 5.000.000 - Rp. 20.000.000. Untuk klasifikasi penggunaan modal Rp.16.000.000 - Rp. 20.000.000 diperoleh pendapatan yang lebih besar dari Rp. 60.000.000.

Tabel 5.1 Modal Kerja Terhadap Pendapatan

Modal (Juta)	Pendapatan (Juta)			
	5-20	21-40	41-60	>60
5-10	3	4	-	-
11-15	1	34	-	-
16-20	-	3	5	1
Total	4	41	5	1

Sumber: Data Primer Responden Usaha Nelayan di Kecamatan Panai Hilir

Pada pemakaian modal kerja Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 diperoleh 3 responden yang berpendapatan Rp. 5.000.000 – Rp. 20.000.000 per bulan, kemudian 4 responden yang berpendapatan Rp. 21.000.000 – Rp. 40.000.000 per bulan. Untuk pemakaian modal Rp. 16.000.000 – Rp. 20.000.000 terdapat 3 responden yang memiliki pendapatan Rp. 21.000.000 – Rp. 40.000.000 per bulan



dan 5 responden memiliki pendapatan berkisar Rp. 16.000.000 – Rp. 20.000.000 per bulan.

5.1.2. Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan

Analisa pengaruh penggunaan tenaga kerja terhadap pendapatan dapat dilihat pada Tabel 5.2 terdapat 3 responden yang memiliki pendapatan Rp. 5.000.000 sampai Rp 20.000.000 dengan penggunaan tenaga kerja antara 8-10 orang, sedangkan responden yang memiliki pendapatan Rp. 21.000.000 - Rp. 40.000.000 menggunakan tenaga kerja 8-10 orang terdapat 9 jumlah responden, dan tidak terdapat responden yang memiliki pendapatan Rp. 41.000.000 - Rp. 60.000.000 dan >Rp. 60.000.000 menggunakan tenaga kerja yang berjumlah 8-10 orang.

Tabel 5.2 Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan

Tenaga kerja (orang)	Pendapatan (Juta)			
	5-20	21-40	41-60	>60
8-10	3	9	-	-
11-13	1	33	4	1
Total	4	42	4	1

Sumber: Data Primer Responden Usaha Nelayan di Kecamatan Panai Hilir

Dari Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pendapatan nelayan yang memiliki tenaga kerja 11-13 orang terdapat 1 responden yang memiliki pendapatan Rp. 5.000.000 sampai Rp. 20.000.000 sedangkan untuk pendapatan Rp. 21.000.000 - Rp. 40.000.000 terdapat 33 responden. Pada pendapatan Rp. 41.000.000 - Rp. 60.000.000 dengan penggunaan tenaga kerja 11 - 33 orang terdapat 4 responden dan pendapatan diatas Rp. 61.000.000 terdapat 1 responden.

Dengan demikian usaha nelayan yang memiliki jumlah tenaga kerja 8-10 orang dan 11-13 orang rata-rata memiliki penghasilan Rp. 21.000.000 sampai Rp. 40.000.000 dapat dilihat dari jumlah responden sebesar 42 orang dari 51 sampel.

5.1.3 Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan

Dilihat dari Tabel 5.3 bahwa sebanyak 13 responden nelayan yang berpengalaman kerja antara 10-15 tahun memiliki penghasilan Rp. 21.000.000 -



Rp. 40.000.000, sedangkan untuk pendapatan Rp. 5.000.000 - Rp. 20.000.000 dengan pengalaman kerja 10-15 tahun terdapat 1 responden saja.

Tabel 5.3 Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan

Pengalaman kerja (tahun)	Pendapatan (Juta)			
	5-20	21-40	41-60	>60
10 – 15	1	13	-	-
16 – 20	3	19	1	1
>20	-	10	3	-
Total	4	42	4	1

Sumber: Data Primer Responden Usaha Nelayan di Kecamatan Panai Hilir

Pengalaman kerja antara 16-20 tahun dengan pendapatan Rp. 5.000.000 - Rp. 20.000.000 terdapat 3 responden nelayan, sedangkan pendapatan Rp. 21.000.000 - Rp. 40.000.000 dengan pengalaman kerja yang sama terdapat 19 responden dan untuk pendapatan Rp. 41.000.000 - Rp. 60.000.000 dan lebih dari Rp. 60.000.000 dengan pengalaman kerja 16-20 tahun hanya terdapat 1 orang responden saja.

Untuk responden nelayan yang berpengalaman lebih dari 20 tahun tidak memiliki penghasilan Rp. 5.000.000 - Rp. 20.000.000 dan lebih dari Rp. 60.000.000 tetapi terdapat pada pendapatan Rp. 20.000.000 - Rp. 40.000.000 dengan jumlah responden sebanyak 10 orang responden dan 3 responden yang memiliki pendapatan berkisar Rp. 41.000.000 - Rp. 60.000.000 dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun.

5.1.4 Teknologi Terhadap Pendapatan

Analisa pengaruh penggunaan teknologi pada usaha nelayan berdasarkan data pada Tabel 5.4 terdapat 40-55 unit usaha penangkapan nelayan dengan pendapatan Rp. 5.000.000 - Rp. 20.000.000 dengan jumlah 2 responden, dan 11 responden yang memiliki pendapatan Rp. 21.000.000 - Rp. 40.000.000 per bulan.



Tabel 5.4 Teknologi Terhadap Pendapatan

Teknologi (unit)	Pendapatan (Juta)			
	5-20	21-40	41-60	>60
40 – 55	2	11	-	-
56 – 70	2	30	2	1
>71	-	1	2	-
Total	4	42	4	1

Sumber: Data Primer Responden Usaha Nelayan di Kecamatan Panai Hilir

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa terdapat 30 responden memiliki pendapatan Rp. 21.000.000 - Rp. 40.000.000 menggunakan jumlah teknologi sebesar 56-70 unit, 2 responden nelayan dengan pendapatan Rp. 5.000.000 - Rp. 20.000.000 dan 1 responden nelayan memiliki pendapatan Rp. 41.000.000 - Rp. 60.000.000 dan 1 responden dengan pendapatan di atas Rp. 60.000.000 per bulan.

Jumlah teknologi di atas 71 unit memiliki pendapatan Rp. 21.000.000 - Rp. 40.000.000 berjumlah 1 responden dan 2 responden dengan pendapatan Rp. 41.000.000 - Rp. 60.000.000.

5.2. Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program aplikasi EViews-7.0 untuk pengolahan data yaitu pengujian model, mencari nilai koefisien tiap variabel dan pengujian hipotesis.

5.2.1. Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis berganda yang merupakan persamaan regresi dengan 2 (dua) atau lebih variabel (*Gujarati, 2003*) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dari Tabel 5.5 dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{LnY} = -1.942709 + 0.786908\text{LnX}_1 + 1.694828\text{LnX}_2 + 0.223049\text{LnX}_3 + 0.410388\text{LnX}_4$$

$$t\text{-hitung} = (4.505944) (2.472701) (2.077069) (2.321928)$$



R-squared = 0.676455
R = 0,822
Adj.R² = 0.648320
F-statistic = 24.04370
N = 51

Tabel 5.5 Hasil Estimasi Metode OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta (c)	-1.942709	2.425065	-0.801096	0.4272
Modal kerja (X ₁)	0.786908	0.174638	4.505944	0.0000
Tenaga Kerja (X ₂)	1.694828	0.685416	2.472701	0.0172
Pengalaman kerja (X ₃)	0.223049	0.107387	2.077069	0.0434
Teknologi (X ₄)	0.410388	0.176745	2.321928	0.0247
R-squared	0.676455			
Adjusted R-squared	0.648320			
f _{hitung}	24.04370			
f _{tabel}	2.802355			
N	51			
Df	47			
Durbin-Watson stat	1.688005			
t _{tabel}	2.008559			

Sumber: Lampiran, data diolah

5.2.2. Uji Statistik

5.2.2.1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar varian dan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Nilai R² paling besar 1 dan paling kecil 0 ($0 < R^2 < 1$). Bila R² sama dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab



variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0.

Dari hasil regresi pengaruh variabel modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja, teknologi (X) terhadap pendapatan (Y) diperoleh nilai R^2 sebesar 0.676455 yang menunjukkan bahwa 67,64 persen dari variasi perubahan pendapatan (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel modal kerja (X_1), tenaga kerja (X_2), pengalaman kerja (X_3), dan teknologi (X_4). Sedangkan sisanya sebesar 32,36 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model sehingga R^2 sebesar 0.676455 dinyatakan bahwa model valid.

Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model tersebut makin tepat. Untuk data survei yang berarti bersifat *cross section*, data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama.

Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R^2 cenderung makin kecil. Sebaliknya dalam data runtun waktu (*time series*) dimana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis pada beberapa tahun maka R^2 cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi data yang lebih kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja (*Yusilisman*).

5.2.2.2. Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji-f). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (*Algifari, 2000*).

Dari hasil regresi pengaruh variabel modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja, teknologi (X) terhadap pendapatan (Y), maka diperoleh f_{tabel} sebesar 2.802355 (α : 5% dan df : $51-4 = 47$) sedangkan $f_{statistik}/f_{hitung}$ sebesar 24.04370. Sehingga, $f_{statistik} > f_{tabel}$ ($24.04370 > 2.802355$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



5.2.2.3. Pengujian Signifikan parsial (Uji-t)

Uji statistik-t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dari hasil regresi pengaruh variabel modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja, dan teknologi terhadap pendapatan usaha nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dengan α : 5% dan $df = 47$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.00856.

5.3. Uji Asumsi Klasik

5.3.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linear. Untuk mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan Eviews 7.0 dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas. Pada Tabel 5.6 *Correlation Matrix* menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model persamaan, karena semua variabel bebas memiliki korelasi yang lemah di bawah 0.79.

Tabel 5.6 *Correlation Matrix*

	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1.000000	0.753664	0.499736	0.521982	0.420901
X1	0.753664	1.000000	0.450051	0.467580	0.321648
X2	0.499736	0.450051	1.000000	0.194766	0.033745
X3	0.521982	0.467580	0.194766	1.000000	0.238646
X4	0.420901	0.321648	0.033745	0.238646	1.000000

Sumber: Lampiran, data diolah

Dimana:

- Y = Pendapatan Usaha Nelayan
- X₁ = Modal Kerja
- X₂ = Tenaga Kerja
- X₃ = Pengalaman Kerja



X_4 = Teknologi

5.3.2. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

- ✓ Kurang 1,10 = Ada autokorelasi
- ✓ 1,0 s/d 1,54 = Tanpa kesimpulan
- ✓ 1,55 s/d 2,46 = Tidak ada autokorelasi
- ✓ 2,46 s/d 2,90 = Tanpa kesimpulan
- ✓ Lebih dari 2,91 = Ada autokorelasi

Tabel 5.7 Hasil Estimasi Metode OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta (c)	-1.942709	2.425065	-0.801096	0.4272
Modal kerja	0.786908	0.174638	4.505944	0.0000
Tenaga Kerja	1.694828	0.685416	2.472701	0.0172
Pengalaman kerja	0.223049	0.107387	2.077069	0.0434
Teknologi	0.410388	0.176745	2.321928	0.0247
R-squared	0.676455			
Adjusted R-squared	0.648320			
f_{hitung}	24.04370			
f_{tabel}	2.802355			
N	51			
Df	47			
Durbin-Watson stat	1.688005			
t_{tabel}	2.008559			

Sumber: Lampiran, data diolah

Dari hasil OLS di atas menunjukkan model tersebut tidak memiliki autokorelasi karena nilai dw 1.688005.



5.3.3. Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Uji heteroskedasitas dapat dilakukan dengan menggunakan *White Heteroskedasticity* yang tersedia dalam program Eviews 7.0.

Tabel 5.8 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.905730	Prob. F(4,47)	0.0317
Obs*R-squared	10.28703	Prob. Chi-Square(4)	0.0359

Sumber: Lampiran, data diolah

Untuk mendeteksi ada tidaknya *heterokedasticity* atau tidak maka dengan membandingkan nilai R-squared dan tabel X^2 :

- Jika nilai R-squared $> X^2$ tabel, maka tidak lolos uji *heterokedsticity*
- Jika nilai R-squared $< X^2$ tabel, maka lolos uji *heterokedasticity*

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa nilai obs* R-square untuk hasil estimasi uji white no coss terms adalah sebesar 10.28703 dan nilai X^2 tabel dengan derajat kepercayaan 5 persen dan df adalah sebesar 64.00111.

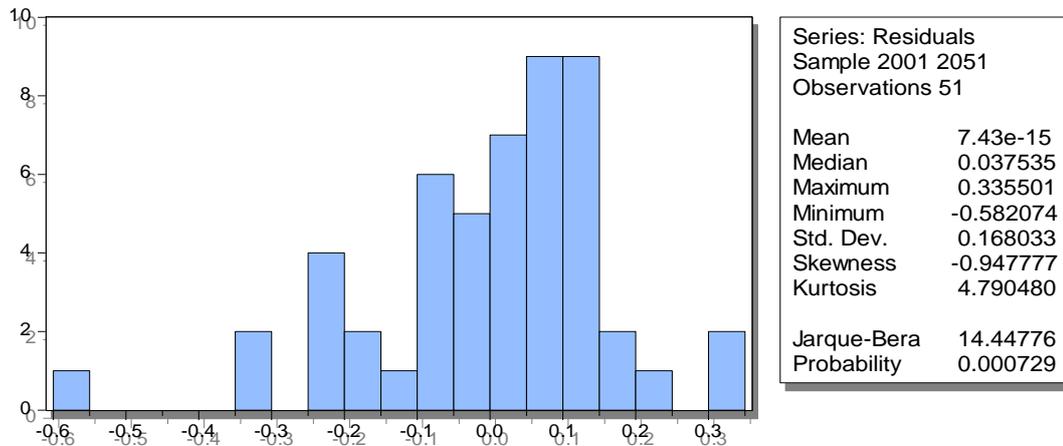
Karena nilai R-squared (10.28703) $< X^2$ tabel (64.00111) maka dapat disimpulkan model di atas lolos uji heterokedastisitas.

5.3.4. Uji Normalitas

Tujuan Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melihat kenormalan data digunakan pengujian menggunakan eviews 7.0 sebagaimana pada Gambar 5.1 di bawah ini :



Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas



Untuk melihat apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai Jarque Bera dengan X^2 tabel, yaitu :

- Jika nilai $JB > X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
- Jika nilai $JB < X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal.

Hasil dari uji normalitas pada Gambar 5.1 bahwa nilai JB (14,44776) < X^2 tabel (64.00111) maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

5.4. Pembahasan Hasil Regresi

Penggunaan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, diperoleh nilai seperti pada Tabel 5.7 untuk melihat pengaruh variabel modal kerja, tenaga kerja, pengalaman kerja, dan teknologi terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

5.4.1. Konstanta atau Intersep

Berdasarkan hasil estimasi data dalam model regresi, terdapat nilai konstanta sebesar -1.942709. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lain selain variable independen berpengaruh negatif terhadap tingkat pendapatan usaha nelayan.

5.4.2. Modal Kerja (X_1)

Nilai koefisien untuk variabel modal kerja (X_1) adalah 0.786908 dimana modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nelayan di Kecamatan Panai Hilir. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 4.505944$ dan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% pada derajat kebebasan (df) = 47 adalah 2.008559, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.505944 > 2.008559$). Jika terjadi kenaikan



modal kerja (X_1) sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi kenaikan pendapatan usaha nelayan (Y) sebesar 0.786908 persen (*ceteris paribus*).

Hasil regresi, modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nelayan yang berarti sesuai dengan hipotesis awal bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nelayan. Hal ini disebabkan karena modal kerja pada usaha nelayan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya, semakin besar modal kerjanya maka semakin besar pula peluang mendapatkan hasil produksi/tangkapan, dimana modal kerja disini meliputi bahan bakar untuk menjalankan mesin, kemudian modal kerja untuk pengawet hasil tangkapan yakni es balok dan garam.

Dalam upaya melakukan pengembangan usaha untuk membuat kehidupan yang lebih terjamin dan berkelanjutan haruslah dibangun diatas pemahaman terhadap aset yang telah dimiliki dan sejauh mana mereka dalam menggunakan dan mengembangkan. Adapun modal tersebut adalah modal sumber daya alam, modal ekonomi, modal fisik. Dalam hal ini modal yang dimaksud adalah modal kerja yang meliputi bahan bakar (solar), pengawet ikan (es balok), dll.

5.4.3. Tenaga Kerja (X_2)

Nilai koefisien untuk variabel tenaga kerja adalah 1.694828 artinya tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir. Hal ini dapat dilihat dengan nilai $t_{hitung} = 2.472701$ dengan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikansi sebesar 5% pada derajat kebebasan (df) = 47 adalah 2.008559, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2.472701 < 2.008559$). Jika terjadi kenaikan tenaga kerja (X_2) sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi kenaikan pendapatan usaha nelayan (Y) sebesar 1.694828 persen (*ceteris paribus*).

Dalam hal ini tenaga kerja sangat berperan penting dalam menangkap ikan, dimana peran tenaga kerja adalah dalam proses penangkapan ikan melalui pengangkatan jaring ikan. Pada tahap tersebut membutuhkan banyak pekerja sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan dari usaha nelayan tersebut.

Segala bentuk usaha kegiatan nelayan yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas kapal motor yang dioperasikan sehingga akan mengurangi biaya



melaut (lebih efisien) yang diharapkan pendapatan tenaga kerja akan lebih meningkat, karena tambahan tenaga tersebut profesional.

5.4.4. Pengalaman Kerja (X_3)

Nilai koefisien untuk variabel pengalaman kerja adalah 0.223049 artinya pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Hilir. Nilai t_{hitung} pengalaman kerja yaitu 2.029551 dimana nilai $t_{tabel} = 2.008559$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.029551 > 2.008559$) sehingga variabel pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nelayan di Kecamatan Panai Hilir. Hubungan yang signifikan menunjukkan bahwa lamanya pengalaman dapat mempengaruhi banyak sedikitnya pendapatan usaha nelayan di Kecamatan Panai Hilir. Jika terjadi kenaikan pengalaman kerja (X_3) sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi kenaikan pendapatan usaha nelayan (Y) sebesar 0.223049 persen (*ceteris paribus*).

Semakin lama pengalaman usaha nelayan maka semakin besar peluang mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, disebabkan karena usaha nelayan tidak menggunakan pedoman atau teknologi untuk mengetahui lokasi-lokasi penangkapan ikan, tetapi hanya mengandalkan pengalaman kerja dilaut.

5.4.5. Teknologi (X_4)

Nilai koefisien untuk variabel teknologi adalah 0.410388 yaitu hubungan variabel teknologi dengan pendapatan usaha nelayan adalah signifikan. Hal ini terlihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.321928 > 2.008559$), sehingga variabel teknologi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nelayan di Kecamatan Panai Hilir. Hubungan yang positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak teknologi yang digunakan maka semakin besar peluang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, sehingga jumlah pendapatan akan meningkat. Jika terjadi kenaikan teknologi (X_4) sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi kenaikan pendapatan usaha nelayan (Y) sebesar 0.410388 persen (*ceteris paribus*).

Disebabkan karena semakin banyak teknologi digunakan terutama pada teknologi penerangan (lampu), semakin besar pula peluang mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak, karena usaha nelayan melakukan aktifitas



penangkapan ikan pada malam hari yang membutuhkan penerangan yang lebih untuk dapat menarik gerombolan ikan masuk di dalam jaring.



VI. ARAHAN KEBIJAKAN

6.1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara terhadap diri sendiri dan sesama. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka dan mandiri. (Dept. Pekerjaan Umum). Selanjutnya *The Commission on Global Government* (Mandela, 1995 dalam Kartasasmita, 1996) menyatakan bahwa pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Kepastian ekonomi adalah esensial agar masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan untuk menguasai *power*.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya lebih luas dari pada hanya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety needs*), namun substansi pemberdayaan adalah mendorong masyarakat dalam membangun potensi yang dimiliki agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat melainkan juga pranata-pranatanya. (Sumirat, 2011).

Pada dasarnya terdapat 7 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pemberdayaan. Ketujuh prinsip tersebut antara lain: prinsip menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat, mengembangkan budaya gotong royong, bekerja bersama masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, kemitraan dan desentralisasi. (Pranata dkk, 2011).

Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak



ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan menderdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional umumnya berada dalam kondisi kemiskinan. Kecuali mereka diberdayakan, ada yang mengangkat mereka berupa memberikan daya dan kekuatan dari luar mereka, maka mereka bias keluar dari kemiskinan. Jika tidak, kemiskinan itu akan tetap ada di antara mereka.

Menurut Nikijulw 2002 dalam Sipahelut, 2010, ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu:

1. Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga;
2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*);
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna;



4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar;
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

Beberapa program pemberdayaan yang dicanangkan pemerintah antara lain program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Dari beberapa program tersebut, hampir seluruhnya menitikberatkan pada pemberdayaan aspek ekonomi sementara aspek-aspek lain seperti pendidikan dan kesehatan belum tersentuh.

6.1.1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Yatmo, 2000 *dalam* Yuliana, 2010).

6.1.2. Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Dua kategori utama yang harus dibedakan dalam masyarakat pantai atau perikanan adalah bahwa budidaya perikanan (*aquaculture*) berbeda dengan penangkapan ikan (*capture fishing*). Dalam pola kerjanya, budidaya perikanan hampir sama dengan pertanian dan peternakan dibandingkan dengan penangkapan ikan. Biasanya dalam budidaya perikanan, memiliki daerah tertentu yang digunakan untuk memelihara ikan dan mempunyai hak atas ikan tersebut. Hak kepemilikan pada budidaya perikanan adalah sama dengan hak kepemilikan di sektor pertanian. Sementara itu penangkap ikan/nelayan sangat bergantung pada daerah terbuka atau dengan kata lain setiap nelayan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya pada area tertentu. Karena tangkapan mereka bersifat liar dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain akan menciptakan persaingan, sehingga nelayan harus terus bergerak. Hal ini berbeda dengan produk budidaya perikanan yang hasil tangkapannya dapat dikontrol. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat nelayan perlu perpaduan antara pemberdayaan faktor-faktor produksi, pendidikan dan pemasaran dengan suatu wadah kerjasama atau kelembagaan.



6.1.3. Pemberdayaan Ekonomi nelayan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kecamatan Panai Hilir kabupaten Labuhanbatu, maka model alternatif strategi pemberdayaan ekonomi untuk nelayan antara lain:

6.1.3.1. Pengembangan Akses Permodalan

Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini pemasalahan utama masyarakat pesisir di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, khususnya nelayan sangat sulit memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya, padahal modal yang diperlukan untuk usaha penangkapan bukan sedikit bila ditinjau dari tingkat kehidupan nelayan tersebut. Sifat usaha perikanan yang musiman, resiko tinggi (penuh ketidakpastian) sering menjadi alasan keengganan pihak bank menyediakan modal bagi usaha perikanan, apalagi tidak ada agunan pinjaman. Untuk nelayan buruh yang rentan terjadi loss income perlu mendapat perhatian mereka perlu mendapatkan bantuan permodalan melalui kegiatan program pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun dari pemerintah pusat.

Dengan memperhatikan kesulitan akses permodalan tersebut, maka salah satu alternatifnya adalah mengembangkan mekanisme pendanaan sendiri (*self financing mechanism*). Bentuk dari sistem ini adalah pengembangan lembaga mikro dan kedepannya diharapkan dapat tumbuh menjadi makro, yang dikhususkan untuk mendukung permodalan usaha di bidang perikanan.

6.1.3.2. Pengembangan Akses Pemasaran

Pasar bisa menjadi kendala utama usaha bila tidak berkembang. Karena itu, membuka akses pemasaran adalah cara untuk mengembangkan usaha perikanan, bila tidak ada pasar maka akan menghambat perkembangan usaha masyarakat pesisir atau nelayan. Untuk membuka akses pemasaran bagi produk-produk usaha perikanan maka diupayakan dengan memfasilitasi atau mendekatkan masyarakat nelayan dengan pedagang antar kabupaten, antar provinsi dan perusahaan-perusahaan besar yang juga eksportir komoditas perikanan.



6.1.3.3. Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan

Pada umumnya jenis teknologi alat tangkap ikan yang digunakan nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu adalah jaring dan pukat. Untuk jenis kapal/perahu penangkapan ikan yang perlu ditingkatkan adalah dari ukuran lebih kecil dari 5 GT menjadi lebih besar dari 5 GT. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi secara terintegrasi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi. Namun demikian upaya pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan teknologi harus juga mempertimbangkan sifat, karakteristik, kemampuan dan kesiapan masyarakat pesisir agar implemetasi teknologi dapat berkelanjutan.

6.1.3.4. Peningkatan Peran Kelembagaan Lokal

Penguatan kelembagaan nelayan sebagai langkah awal untuk melakukan pemberdayaan karena merupakan sebagai wadah tempat kerjasama, transfer informasi, transfer teknologi dan sebagai legalitas informal dalam menerima program dari pemerintah. Kedinamisan kelembagaan perlu diciptakan dengan pembentukan kepengurusan yang aktif dan pemupukan permodalan kelembagaan. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat secara sosial dan ekonomi, serta sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri.

Disamping itu upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan lokal, maka perlu membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan, sebagai jembatan untuk memberikan peningkatan keterampilan, pelatihan tentang pengolahan ikan dan diversifikasi produk olahan yang berbahan baku dari ikan.

6.1.3.5. Pendampingan secara Kontinyu Oleh Pemerintah

Merubah perilaku masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena keterbatasan kemampuan para nelayan dalam menerima transfer teknologi dan mengatasi masalah-masalah seiring berjalannya suatu program. Hal lain juga dipengaruhi oleh sifat atau karakter suatu masyarakat atau adat istiadat kebiasaan pada suatau daerah tertentu. Upaya ke arah perubahan yang diharapkan memerlukan waktu yang panjang, di samping ketekunan dan kesabaran. Oleh karena itu dibutuhkan proses pendampingan yang cukup lama. Proses pemberdayaan yang menggunakan pendekatan proyek harus ditunjang dengan



peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan porsi yang lebih besar dibandingkan mediator proyek.

6.1.3.6. Pengembangan Ekonomi Basis Lokal atau Ekonomi Setempat

Membangun kemandirian sosial ekonomi lokal dapat ditempuh melalui pembangunan lokal yang bertumpu pada pemberdayaan penduduk setempat berbasis komunitas. Pembangunan lokal, diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial-ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, sistem sosial, sumber daya alam dan infrastruktur. Hal ini harus dilakukan pada skala yang kecil (skala komunitas), dengan mengorganisasi serta mentransformasi sumber-sumber dan potensi menjadi penggerak bagi pembangunan lokal.

Pemberdayaan nelayan bertujuan pada perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan di kalangan komunitas nelayan agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan komunitas nelayan. Mengacu pada upaya tersebut, alternatif pemberdayaan berbasis lokalitas yang dapat ditempuh memiliki karakteristik antara lain; (1) prakarsa berasal dari komunitas setempat, (2) dimulai dengan pemecahan masalah ril komunitas, (3) sumber utama adalah rakyat dan sumber daya lokal, (4) kesalahan dapat diterima, (5) kelembagaan pendukung dibina dari bawah, (6) evaluasi dilakukan sendiri, (7) berkesinambungan dan berorientasi pada proses, (8) kepemimpinan bersifat kuat, (9) fokus manajemen adalah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan. Strategi pemberdayaan alternatif yang diusulkan mengacu pada pemberdayaan dengan berbasis pada co-manajemen.

6.1.3.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Perikanan

Sarana prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari kegiatan suatu usaha/bisnis. Ketersediaan sarana prasarana pendukung tersebut sangat mempengaruhi berkembangnya usaha perikanan seperti dermaga sandar, TPI dan pabrik es, BBM, listrik serta prasarana jalan untuk membawa produksi perikanan ke pasar. Masih minimnya sarana tersebut menyebabkan tingginya biaya operasional, kualitas rendah karena keterbatasan es batu dan akhirnya



harga ikan menjadi rendah. Dalam mendukung pemberdayaan nelayan, perlu dilakukan pembangunan fisik *cold storage*, memfungsikan TPI dan pabrik es di tempat-tempat yang masih mengalami kekurangan sarana prasarana tersebut. Pembangunan *cold storage* dan pabrik es di dekat sentra-sentra usaha perikanan tangkap dapat menunjang meningkatkan kualitas produksi ikan.

6.1.3.8. Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga (*Momprenneur*)

Kusnadi (2003) menyatakan bahwa mobilitas vertikal nelayan dapat terjadi oleh dukungan para istri mereka yang memiliki kecakapan berdagang. Keberadaan dan kedudukan istri tersebut tentunya dapat menjadi katalis peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Akan tetapi, peranan perempuan keluarga nelayan belum optimal dalam membantu peningkatan ekonomi keluarganya, terutama berkaitan dengan proses pengelolaan hasil pasca tangkap. Pengetahuan dan keterampilan mereka masih terbatas dan belum pernah memperoleh inovasi teknologi.

Menurut Widodo (2001) menyatakan bahwa model pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir dapat dikembangkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu pengembangan kelompok (*community development*), pra-pengembangan usaha (*pre-business development*), dan pengembangan usaha (*business development*).

6.2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Dalam rangka perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu secara berkelanjutan, tentunya tidak hanya dilihat dari segi aspek ekonomi semata tetapi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perikanan lainnya, seperti sumberdaya ikan, teknologi, sosial dan kelembagaan lokal.

Secara umum terdapat 8 (delapan) model pemberdayaan ekonomi nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

S1 : Pengembangan Akses Permodalan

S2 : Pengembangan Akses Pemasaran

S3 : Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan

S4 : Peningkatan Peran Kelembagaan Lokal

S5 : Pendampingan secara Kontinyu Oleh Pemerintah



S6 : Pengembangan Ekonomi Basis Lokal atau Ekonomi Setempat

S7 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Perikanan

S8 : Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga (*Momprenneur*)

Tabel 6.1. Matriks SWOT Strategi Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu

Internal Eksternal	<u>Kekuatan (S)</u>	<u>Kelemahan (W)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah 2. Tenaga kerja tersedia 3. Potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar. 4. Motivasi masyarakat nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan dan penguasaan teknologi masih kurang 2. Jiwa <i>enterpreneour</i> rendah 3. Tingkat pendidikan rata-rata rendah 4. Posisi tawar terhadap pedagang pengepul rendah 5. Akses permodalan rendah 6. Keterbatasan fasilitas penunjang usaha perikanan
<u>Peluang (O)</u>	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan hasil produksi ikan tinggi dan dekat dengan pasar luar negeri. 2. Lokasi penangkapan (<i>fishing ground</i>) dekat dan luas 3. Kualitas perairan yang cukup baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Akses Pemasaran ▪ Pendampingan secara Kontinyu Oleh Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan ▪ Pengembangan Akses Pemasaran ▪ Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga (<i>Momprenneur</i>)
<u>Ancaman (T)</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif 2. Harga pasar ditentukan oleh pihak pengepul 3. Harga BBM terus meningkat 4. Penangkapan ikan tergantung musim 5. Hasil produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Ekonomi Basis Lokal atau Ekonomi Setempat ▪ Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Peran Kelembagaan Lokal



berfluktuasi		
--------------	--	--

Sumber: Data Hasil Analisis

6.3. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir dan Hubungannya Terhadap Sistem Toke Pada Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Nelayan dan komunitas desa pesisir, pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah dan acapkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan (tradisional) bukan saja sehari-hari harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan membuka akses modal terhadap nelayan. Selama ini ada kesulitan akses nelayan terhadap modal, membuat masyarakat kembali ke pola ekonomi tradisional, dengan memanfaatkan figur toke yang ada dalam masyarakat sehingga nelayan sangat tergantung pada toke.

Sistem ini pada realitasnya tidak membangun kemandirian, namun dengan berbagai alasan dimanfaatkan oleh nelayan agar mereka tetap bisa melaut. "Pemilihan sektor perikanan tangkap ini juga didasarkan pada besarnya jumlah masyarakat Panai Hilir yang menggantungkan hidup di sektor ini, kemudian juga mempertimbangkan nilai signifikan sektor ini dalam penerimaan daerah,".

Dalam kehidupan nelayan di kenal toke. Sistem toke ini dapat dinilai berdasarkan dampak positif dan negatif. Di satu sisi sistem toke bangku menjamin ketersediaan modal yang lancar dan juga jaminan untuk memperoleh pinjaman bagi nelayan di masa paceklik, akan tetapi semua itu bukan atas prinsip kerjasama untung-rugi ditanggung bersama, bahkan tetap menjadi hutang yang harus dibayar oleh nelayan.



"Sistem toke juga sangat kuat karena didirikan di atas jaringan perdagangan antar agen. Tidak mudah bagi pihak manapun untuk mengintervensi praktek ini termasuk untuk membantu nelayan dalam kondisi mereka masih terikat modal dengan toke"

Dari pengamatan yang ada, persoalan utamanya karena nelayan tidak mampu mengimbangi kebutuhan modal yang mereka butuhkan dengan penghasilan yang mereka peroleh. "Kebutuhan modal melaut relatif besar sedangkan keuntungan melaut relatif kecil, namun toke dapat mengatasi persoalan tersebut. Keadaan nelayan seperti ini sangat menguntungkan toke dengan bisnis perdagangan ikan yang dia miliki. Aturan bahwa semua hasil tangkapan diserahkan ke toke yang diiringi dengan sistem lelang tertutup adalah dua persoalan kunci yang mengekang nelayan untuk terus berada dalam sistem ini,".

Berdasarkan perkembangannya ada pun sistem toke pada lembaga keuangan masyarakat nelayan daerah Kecamatan Panai Hilir adalah dalam proses simpan pinjam sesuai dengan kesepakatan antara toke dan nelayan dimana :

1. Apabila melakukan pinjaman nelayan bebas meminjam sesuai dengan kemampuan hasil tangkapannya dan pinjaman itu dipotong sesuai dengan penghasilannya setelah menangkap ikan.
2. Setelah melakukan pinjaman nelayan harus menyetorkan seluruh hasil tangkapan kepada toke dimana hal ini telah disepakati terlebih dahulu antara toke dan nelayan adapun harga dari ikan tersebut sesuai dengan harga pasaran, dalam perkembangan saat ini toke tidak melakukan system menekan kepada pihak nelayan.
3. Apabila nelayan tidak mampu dalam melakukan pembayaran pinjaman tersebut maka nelayan harus menjadi pekerja pada kapal penangkap ikan toke sampai pinjaman dilunasi.

Untuk perkembangannya ke depan sistem toke ini pada masyarakat nelayan yang ada masih sangat dibutuhkan karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa mereka mempunyai keterkaitan yang erat dalam perkembangan lembaga ekonomi yang telah terbangun sejak zaman nenek moyang para nelayan tersebut.



Dalam struktur perkembangan kelembagaan seperti ini masih sangat diperlukan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada pada daerah pesisir karena mereka masih sangat tergantung, selain prosesnya mudah dalam mendapatkan akses bantuan keuangan mereka juga telah menjadikan toke sebagai bagian dari keluarga dari segi kondisi keuangan.

Adapun kendala pada pemberdayaan dilihat dari kondisi Masyarakat Nelayan yang berhubungan dengan system toke yang ada pada masyarakat pesisir daerah Kecamatan Panai Hilir dapat disimpulkan bahwa :

1. Nelayan miskin adalah bagian dari komunitas masyarakat pesisir yang secara sosial-ekonomi rentan, tidak memiliki tabungan, kurang atau tidak berpendidikan, dan acapkali menghadapi tekanan kemiskinan yang kuat karena berbagai keterbatasan yang dimiliki dan pengaruh faktor struktural di sekitarnya. Jumlah anak yang cenderung banyak menyebabkan beban yang mesti ditanggung menjadi berat karena tidak sebanding dengan sumber-sumber penghasilan yang dapat diakses.
2. Pasca kenaikan harga BBM, tekanan kemiskinan yang dialami keluarga nelayan miskin cenderung makin intens dan berat, karena “efek domino” menyebabkan terjadinya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari yang justru bertolak-belakang dengan kecenderungan menurunnya penghasilan yang diperoleh keluarga nelayan miskin.
3. Akibat keterbatasan teknologi dan aset produksi yang dimiliki, daya jelajah para nelayan miskin di kawasan Selat Malaka umumnya terbatas, dan berimplikasi pada jumlah dan jenis tangkapan ikan yang makin lama makin berkurang. Rata-rata penghasilan yang diperoleh nelayan miskin sangat kecil dan hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sebagian terpaksa hidup serba kekurangan.
4. Musim paceklik dan makin berkurangnya sumber daya laut di wilayah sekitar pantai adalah kondisi yang seringkali menyebabkan kehidupan sehari-hari nelayan miskin makin terpuruk. Peluang untuk terus mempertahankan dan mengembangkan pola kehidupan yang subsisten makin kecil, karena kebutuhan konsumsi yang makin bervariasi dan terjadinya kenaikan harga



kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan mereka.

5. Usaha dari hasil melaut dalam banyak hal tidak lagi dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bahkan termasuk kebutuhan dasar anggota keluarga, khususnya pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan seluruh anggota keluarga.
6. Kebijakan modernisasi perikanan yang dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan logika produksi atau sekadar mengejar peningkatan hasil tangkapan ikan, bukan saja menyebabkan terjadinya pengurasan sumberdaya laut yang tak terkendali (*over exploited*), tetapi juga melahirkan proses marginalisasi dan polarisasi yang makin menyolok mata.
7. Kemampuan nelayan miskin untuk melakukan diversifikasi usaha umumnya rendah. Di sisi lain, peluang atau kesempatan kerja yang tersedia di luar sektor perikanan umumnya juga tidak terlalu menggembirakan dan tidak sesuai dengan karakteristik sosial nelayan miskin.
8. Kemungkinan nelayan miskin untuk membuka usaha sendiri dalam banyak hal terkendala faktor modal.
9. Peran perempuan dan anak dalam keluarga nelayan miskin umumnya strategis, baik sebagai salah satu penyangga ekonomi keluarga yang potensial maupun sebagai tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan untuk memberi nilai tambah terhadap ikan hasil tangkapan nelayan miskin.
10. Bagi keluarga nelayan miskin, peran dan dukungan bantuan dana dari pemerintah sangat strategis dan fungsional untuk menunjang mereka mengembangkan diversifikasi usaha.
11. Beberapa potensi yang dimiliki dan peluang yang mungkin dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Panai Hilir adalah: (1) mendorong dan melibatkan nelayan miskin dalam proses modernisasi perikanan, (2) menata pembagian margin keuntungan yang lebih berpihak kepada nelayan miskin, (3) melakukan diversifikasi produk dengan cara memberi nilai tambah pada komoditi ikan yang sifatnya rentan waktu, dan (4) mengembangkan diversifikasi usaha bagi nelayan



miskin agar mereka dapat memiliki sumber-sumber penghasilan alternatif yang lebih banyak.

12. Jenis usaha yang prospektif dikembangkan dalam rangka mendorong diversifikasi usaha keluarga nelayan miskin umumnya adalah kombinasi sektor perikanan dengan sektor pertanian, perdagangan tradisional dan industri kecil, serta sektor informal.

6.4. Analisis Kelembagaan

6.4.1. Kelembagaan Usaha Perikanan

Kelembagaan atau pranata sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Sanim, 2002). Komponen kelembagaan dalam penelitian ini terdiri atas nelayan sebagai anggota masyarakat, teknologi dan informasi perikanan, pemasaran, kelompok nelayan, permodalan, pemerintah dan aturan tidak tertulis dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Nelayan sebagai makhluk sosial memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan sistem interaksi yang harmoni dalam masyarakat dan memberikan pegangan dalam kontrol sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik nelayan pendatang maupun lokal, mekanisme interaksi sosial berlangsung secara bersama-sama, dimana selain berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan usaha perikanan, beberapa nelayan juga memiliki peran dalam masyarakat sebagai pengatur desanya.

Masyarakat Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, didominasi oleh penduduk lokal dan hanya sebagian pendatang. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Penduduk yang berperan sebagai nelayan adalah penduduk lokal, sedangkan pendatang umumnya bergerak pada usaha armada perikanan tonase besar.

Pemasaran hasil perikanan di Panai Hilir lebih banyak dikuasai oleh penduduk lokal, kecuali untuk jenis ikan besar. Pemasaran hasil perikanan disamping kebutuhan di pasar lokal juga untuk ekspor. Ekspor hasil perikanan terutama ke Negara Malaysia. Pemasaran ikan dipasar lokal umumnya berasal dari hasil tangkapan nelayan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, serta



produksi ikan dari budidaya air tawar. Sementara ekspor hasil perikanan yang dilakukan melalui pelabuhan Tg. Balai Asahan sebagian besar adalah produksi perikanan tangkap yang berasal dari Sumatera Barat dan Riau.

Secara umum pemodal usaha perikanan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu berasal dari pengusaha lokal dan juga pendatang yang berinvestasi pada usaha tersebut. Investasi berupa penyediaan armada dan alat tangkap serta biaya operasional penangkapan. Sistem bagi hasil terkait usaha ini antara nelayan dan pengusaha bisa berupa rantai penjualan/pemasaran atau bagi hasil secara langsung di lapangan.

Beberapa perhimpunan atau organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan pengembangan sumberdaya perikanan juga terdapat di Kabupaten Labuhanbatu. Organisasi tersebut diantaranya HNSI Kabupaten Labuhanbatu (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), PPNSI (Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia) serta kelompok-kelompok nelayan yang terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu. Nelayan dan pelaku usaha perikanan juga membentuk kelompok pelaku usaha perikanan (POKMASWAS) dimana pembinaan dan pengembangan kelompok diarahkan pada aspek manajemen, pengembangan usaha, pengembangan keterampilan dan kerjasama antar anggota dalam pengelolaan usaha.

Aturan lokal dalam mengendalikan penangkapan ikan di laut pada masyarakat nelayan Kabupaten Labuhanbatu belum ada, baik yang terkait dengan waktu penangkapan, jenis, ataupun ukuran ikan yang ditangkap.

Kelembagaan masyarakat nelayan Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung program pembangunan perikanan meliputi; kelompok nelayan, kelompok masyarakat pengawas, kelompok pedagang dan pengolah ikan serta lembaga ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, masyarakat nelayan di kawasan ini perlu diberikan tambahan pengetahuan tentang kelestarian sumberdaya, jenis alat tangkap dan ukuran ikan yang layak ditangkap. Pada masyarakat tersebut belum terdapat bentuk kelembagaan dalam mengantisipasi peningkatan hasil tangkapan, sehingga selama ini kelebihan produksi tergantung pada mekanisme pasar.



Penguatan pengaturan (*governance*) dan manajemen perikanan berkelanjutan diperlukan melalui penguatan kelembagaan sebagai berikut:

- (a) **Sistem Manajemen Perikanan**, khususnya penguatan kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Kelautan dan Perikanan, LSM Perikanan dan Kelautan, Organisasi Tingkat Propinsi dan Masyarakat Lokal.
- (b) **Sistem Monitoring, Control dan Surveillance (MCS)** termasuk kelengkapan kapal patroli dan peran *FMS (Fisheries Monitoring System)*.
- (c) **Sistem Peradilan Perikanan** baik secara otonom maupun bagian dari **Sistem Peradilan Nasional**.
- (d) Penerapan **Co-Management** yang melibatkan masyarakat nelayan secara aktif.
- (e) Pengaturan **Hak Pemanfaatan Cadangan Ikan** secara bijak, efisien dan efektif.

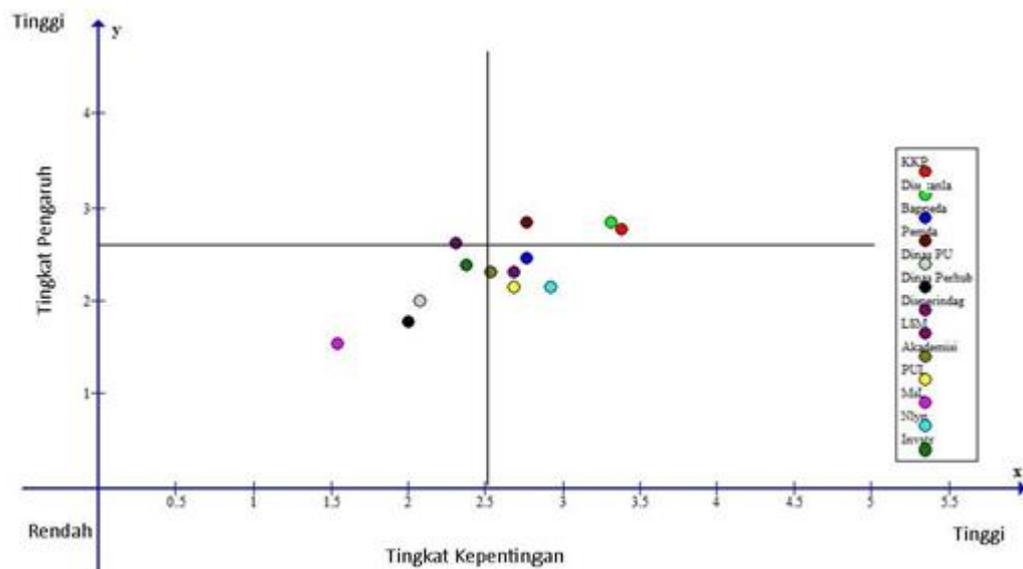
6.4.2. Analisis *Stakeholder* dalam Pengembangan Perikanan

Dalam rangka membuat suatu kebijakan terkait pengembangan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu, maka diperlukan suatu kerjasama dari berbagai pihak untuk merumuskannya. Berbagai *stakeholder* dianggap berperan penting dalam merumuskan suatu kebijakan. Adapun *stakeholder* tersebut adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi terkait, masyarakat lokal, pengusaha, nelayan, akademisi serta LSM. Tentunya masing-masing pihak memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam merumuskan suatu kebijakan.

Analisis *stakeholder* perlu dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompeten dalam merumuskan kebijakan tersebut. Schmeer (2000) menyatakan analisis ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif dalam menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan atau menerapkan suatu kebijakan. *Stakeholder* dapat diartikan sebagai individu, kelompok atau lembaga yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan atau pihak yang tindakannya secara kuat mempengaruhi kebijakan. Setiap *stakeholder* memiliki pengaruh dan



kepentingan dalam kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan. *Stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi merupakan *stakeholder* primer dimana kepentingannya dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan. Sedangkan *stakeholder* sekunder, kepentingannya dipengaruhi secara tidak langsung. Daftar *stakeholder* serta pengaruh dan kekuatannya dapat dilihat pada Tabel 6.2.



Gambar 1. Matriks Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder* dalam Pengembangan Perikanan yang Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu

Keterangan *Stakeholder* :

KKP RI (Ditjen Perikanan Tangkap), Diskanla Kabupaten Labuhanbatu, Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu), Pemda (Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu), Dinas PU Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Akademisi, Pemilik Unit Usaha Lokal, Masyarakat Lokal, Nelayan, Investor/Pengusaha Luar.

Kepentingan *stakeholder* dalam kebijakan pengembangan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dipengaruhi oleh faktor ekologi, sosial dan ekonomi. Pengaruh *stakeholder* yang berbeda-beda dalam kebijakan ini disebabkan oleh faktor politik, birokrasi dan struktural. Hasil dari kajian pada Tabel 6.2 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan matriks kepentingan dan



pengaruh *stakeholder* dalam kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Stakeholder yang dianalisis dalam penelitian ini adalah segenap pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program-program pengembangan perikanan, baik berupa minapolitan, industri perikanan ataupun kebijakan lainnya dalam hal pengembangan perikanan. Hasil analisis *stakeholder* menetapkan beberapa *stakeholder* primer yang akan diikutsertakan dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu. *Stakeholder* primer dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Labuhanbatu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu (DPKP) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Pemda). *Stakeholder* primer yang diperoleh pada tahapan analisis ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka menjawab tantangan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Labuhanbatu.



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.2. Analisis *Stakeholder* Pengembangan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu

No.	Stakeholder	Kepentingan	Kriteria Evaluasi					Pengaruh	Total	Keputusan	
			Sikap	Kekuatan			Keterlibatan			Tingkat Keterlibatan	
				S	F	P					
1	KKP RI (Ditjen Perikanan Tangkap)	Perencanaan dan Pengembangan Program Perikanan lainnya	3	3	4	4	11	33	Terlibat	Pengambil Kebijakan	
2	Diskanla Labuhanbatu	Membina masyarakat nelayan, Koordinasi dengan instansi terkait.	3	3	4	4	11	33	Terlibat	Pengambil Kebijakan	
3	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Membuat masterplan dan rencana strategis pengembangan perikanan, Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam mengembangkan perikanan	3	3	3	3	9	27	Terlibat	Pemberi Pertimbangan	
5	Pemerintah Daerah	Melakukan inisiasi dan mengkoordinasikan program minapolitan dengan instansi terkait	3	3	4	4	11	33	Terlibat	Pengambil Kebijakan	
6	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	Membangun prasarana dan sarana terkait pengembangan perikanan, Meningkatkan fasilitas perikanan	2	3	4	3	10	20	Terlibat	Penerima Informasi	



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.2 . Lanjutan

7	Dinas Perhubungan	Meningkatkan sarana dermaga/pelabuhan dan jalan raya di kawasan minapolitan	2	3	3	3	9	18	Diabaikan	Penerima Informasi
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatkan sarana industri perikanan, Meningkatkan sarana perdagangan domestik dan internasional, Penyediaan sarana bahan bakar armada penangkapan	2	3	3	3	9	18	Terlibat	Penerima Informasi
9	LSM	Memberikan pengetahuan dan pendampingan terkait pengelolaan sumberdaya perikanan, Melakukan kontak langsung dengan masyarakat nelayan	2	3	3	2	8	16	Diabaikan	Penerima Informasi
10	Akademisi	Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM di bidang perikanan, Riset dan pengabdian masyarakat di bidang perikanan	3	3	2	2	7	21	Diabaikan	Pemberi Pertimbangan
11	Pemilik Unit Usaha Lokal	Meningkatkan kesejahteraan, Meningkatkan aktivitas ekonomi	3	2	3	2	7	21	Diabaikan	Pemberi Pertimbangan
12	Masyarakat Lokal	Memperoleh pekerjaan, Meningkatkan kesejahteraan	2	2	2	1	5	10	Diabaikan	Penerima Informasi
13	Nelayan	Meningkatkan kesejahteraan	3	4	1	1	6	18	Diabaikan	Penerima Informasi
14	Investor/Pengusaha Luar	Membuka lapangan pekerjaan, Meningkatkan keuntungan	2	2	5	2	9	18	Diabaikan	Penerima Informasi

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018

Keterangan: S: Sumberdaya Manusia, F: Finansial, P: Politik



VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu:

1. Tingkat penggunaan modal kerja yang terdiri dari penggunaan BBM, es balok, akan berbanding lurus terhadap pendapatan nelayan hingga titik optimum. Semakin tinggi nilai penggunaan modal kerja semakin besar peluang meningkatnya pendapatan nelayan di kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
2. Penggunaan tenaga kerja, pendapatan nelayan dipengaruhi oleh jumlah menggunakan tenaga kerja. Pendapatan nelayan yang menggunakan tenaga kerja akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan tenaga kerja
3. Pengalaman kerja nelayan, semakin lama pengalaman kerja nelayan akan semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, hal ini berkaitan dengan keterampilan dan penguasaan teknik penggunaan alat tangkap dan penempatan lokasi penangkapan ikan .
4. Teknologi yang digunakan. penggunaan teknologi yang berpengaruh disini adalah ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan. Semakin besar ukuran kapal yang digunakan pendapatan nelayan akan semakin tinggi, sedangkan penggunaan alat tangkap pukat tarik mini memberikan penghasilan bagi nelayan yang paling tinggi.
5. 8 (delapan) model pemberdayaan ekonomi nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yaitu Pengembangan Akses Permodalan, Pengembangan Akses Pemasaran, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, Peningkatan Peran Kelembagaan Lokal, Pendampingan secara Kontinyu Oleh Pemerintah, Pengembangan Ekonomi Basis Lokal atau Ekonomi Setempat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga (Momprenneur)
6. *Stakeholder* primer dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Labuhanbatu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu (DPKP) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Pemda). *Stakeholder* primer yang diperoleh pada tahapan analisis ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka menjawab tantangan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Labuhanbatu.



7.2. Rekomendasi

Lampiran Rekomendasi Strategi Peningkatan pendapatan nelayan di Kecamatan Panai Kabupaten Labuhanbatu

No	Strategi	Program	Kegiatan	Lokasi Pengembangan	Estimasi Anggaran Biaya (jt rupiah)	Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
1	Tahapan Konsolidasi	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Tradisional menuju ke arah lebih modern.	1. Peningkatan Dinamika KUB, Legalitas Kelembagaan 2. Perintisan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP).	Kecamatan Panai Hilir	65	2019	APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Koordinasi antar Stakeholders	1. Perintisan Forum stakeholder pengembangan Kawasan Khusus (Mina	Kabupaten Labuhanbatu	30	2019-2020	APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN	Bappeda



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

			Politan)					
2.	Tahapan Percepatan	1. Peningkatan kekuatan permodalan dan penumbuhan usaha menuju kemandirian	1. Bantuan Permodalan kapal motor tempel untuk penumbuhan usaha bagi nelayan buruh	Kecamatan Panai Hilir	400	2020-2025	APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN	Dinas Perikanan dan Kelautan
			2. Pemanfaatan dana lembaga keuangan ekonomi mikro di tingkat Desa (Bumdes)	Kecamatan Panai Hilir	400	2020-2025	APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN	Dinas Perikanan dan Kelautan
			3. Penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan	Kecamatan Panai Hilir	45	2019-2020	APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN	Dinas Perikanan dan Kelautan
			4. Peningkatan Jumlah peserta Asuransi bagi Nelayan	Kecamatan Panai Hilir	75	2019-2020	APBN	Dinas Perikanan dan Kelautan,



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

		2. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan keluarga nelayan	5. Pelatihan usaha pengolahan ikan dan udang Ebi	Kecamatan Panai Hilir	15	2019	APBD Provinsi	Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Sosial
		3. Peningkatan peran istri nelayan sebagai penopang ekonomi keluarga nelayan (Gender)	6. Pelatihan diversifikasi produk yang berbahan baku ikan bagi istri nelayan	Kecamatan Panai Hilir	45	2019-2020	APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN	Dinas Perikanan dan Kelautan, BPMPD
3.	Tahapan Transformasi	Optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung pemasaran dan pembangunan infrastruktur wilayah	1. Pengelolaan TPI yang Profesional, transparan dan bebas dari pungli dan premanisme 2. Pembangunan Dermaga, jalan, <i>Coldstorage</i> , pabrik es, menjamin ketersediaan air bersih dan Listrik di TPI	Kecamatan Panai Hilir Kecamatan Panai Hilir	15 400	2019 2020	APBD Provinsi/Kab APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN	Dinas Perikanan dan Kelautan dan, Bappeda, instansi vertikal yang terkait



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

		Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemasaran dan promosi baik swasta dan pemerintah.	1. Peningkatan kerjasama dengan pihak koperasi (permodalan dan pemasaran produk).	Kecamatan Panai Hilir	200	2019-2020	APBD Kabupaten, Provinsi	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Provinsi/Kab
4	Tahapan Penguatan	1. Pengembangan industri pengolahan ikan	1. Pembangunan pusat industri pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Panai Hilir	300	2021-2026	APBD Provinsi/Kab	PU



DAFTAR PUSTAKA

- Apple, J.M. 1990. *Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan*. Terjemahan. Penerbit ITB, Bandung.
- Arief, Hazmi. 2014. *Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap Kota Dumai*. 250 Hal. Tesis Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- Ariyoto, K.1980. *Feasibility Study*. Penerbit Mutiara, Jakarta.
- Bill Foster dan Karen R. Seeker. 2001. *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Penerbit : PT.Toko Gunung Agung Tbk Jakarta.
- BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2016. *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu.
- BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2017. *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu.
- Dinas Perikanan Kabupaten Labuhanbatu. 2017. *Profil Perikanan Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2017*.
- Edris, M. 1983. *Penuntun Menyusun Studi Kelayakan Proyek*. Sinar Baru, Bandung.
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga.
- Gunadi. 2000. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Multi Utama Indojasa, Jakarta.
- Imron, Masyuri. 2003. *Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan dalam Jurnal masyarakat dan budaya*. PMB – LIPI.
- Joesron, Tati Suhartati dan Fathorrozi. 2003. *Teori Ekonomi Mikro Dilengkapi Beberapa Bentuk Fungsi Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartasasmita, 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta : UGM.
- Kusnadi. 2002. *Nelayan, Strategi Adaptasi, dan Jaringan Sosial*. Cetakan Kedua. Humaniora Utama Press. Bandung.



- Miller, R. L. R. E. Miner, 1999, *Teori Ekonomi Mikro Intermediate*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mubyarto. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi Ketiga. LP3ES. Jakarta.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- PERMEN PERDAGANGAN RI. 2009. *Permen-Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*. Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahardja, Pratama. 2010. *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sastrawidjaya dan Manadiyanto. 2002. *Nelayan Nusantara. Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.
- Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sutojo, 1993. *Studi Kelayakan Proyek, Teori dan Praktek*. Gramedia, Jakarta.
- Trijoko, Prasatya. 1980. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Renika
- Wibowo, S. 2000. *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*. Penebar Swadaya, Jakarta.